



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI DENGAN MENTERI BUMN,
WAMEN II BUMN, DIRUT PT BRI (PERSERO) TBK, DIRUT PT PEGADAIAN
(PERSERO), DIRUT PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO).**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke- : 11 (sebelas)
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Kamis, 18 Maret 2021
- Waktu : 10.20 WIB s.d. 14.17 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR Republik Indonesia
Gedung Nusantara I Lt, Jl. Jenderal Gatot Soebroto,
Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
- Acara : Pembahasan mengenai Pembentukan Holding Ultra
Mikro
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi
VI DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
40 dari 53 orang Anggota dengan rincian :
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Adisatrya Suryo Sulistio
 3. Muhammad Prakosa
 4. Darmadi Duriyanto
 5. Rieke Diah Pitaloka
 6. ST. Ananta Wahana, S.H.
 7. Sonny T. Danaparamita
 8. I Nyoman Parta, S.H.
 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Matriks)
 10. Sondang Tiar Debora Tampubolon

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P
 2. Drs. Mukhtarudin
 3. Lamhot Sinaga
 4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
 5. Doni Akbar, S.E.
 6. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
6 dari 7 orang Anggota
 1. Mohamad Hekal, M.B.A.
 2. Andre Rosiade
 3. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
 4. Khilmi
 5. Ir. H. La Tinro La Tunrung
 6. M. Husein Fadlulloh, B.Bus.,M.M.,
M.B.A.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Martin Manurung, S.E.,M.A.
 2. Drs. H. Nyat Kadir
 3. H. Subardi, S.H., M.H.
 4. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 5. Muhammad Rapsel Ali

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
6 dari 6 orang Anggota
 1. Faisol Riza, S.S.
 2. Ir. H. M. Nasim Khan
 3. Tommy Kurniawan
 4. Marwan Ja'far
 5. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos.,
M.Si.
 6. Siti Mukaromah, S.Ag.,M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
(matriks)
 2. Hj. Melani Leimena Suharli
 3. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

1 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Abdul Hakim Bafagih

2. Nasril Bahar, S.E.

3. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.

B. MENTERI BUMN, WAMEN II BUMN DAN JAJARANNYA

C. DIRUT PT BRI (PERSERO) TBK

D. DIRUT PT PEGADAIAN (PERSERO)

E. DIRUT PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

F. UNDANGAN YANG LAIN

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/F-PDIP):

Rekap dari Sekretariat, Anggota yang menandatangani daftar hadir 20, Anggota yang ijin 1, kuorum Fraksi sudah 6, jadi kuorum untuk Rapat segera kita mulai.

F-PG (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Assalamualaikum Pak Menteri, Idris Laena Pak Menteri, siap siap.

KETUA RAPAT:

Pak Nasril apakah hanya fotonya ada suaranya itu? Pak Nyat Kadir?

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Hadir Ketua hadir hadir.

KETUA RAPAT:

Pak Nasril hadir.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.) :

Saya juga hadir.

KETUA RAPAT:

Tujuh (7) Fraksi telah kuorum, Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN, Kamis 18 Maret 2021.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Om swastiastu.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI hadir disini Pak Demer, Pak Faisol menghadiri acara DPR di Nusantara 3.

Selamat datang kepada yang terhormat seluruh kawan-kawan Anggota Komisi VI DPRI.

Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara Menteri BUMN Pak Erick Thohir beserta seluruh jajarannya.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan Rapat Kerja pada hari ini, tentunya kita dalam keadaan sehat wal'afiat, dan tentunya lagi kita terhindar dari wabah Covid-19, dan tentunya lagi kita lebih *confident* karena anggota mungkin sebagian besar sudah mendapatkan vaksin untuk yang ke-2 kalinya.

Situasi tetap kondisi saat ini kita melakukan rapat-rapat dengan dengan Alat Kelengkapan Dewan dan mitra kerja tetap mengacu pada Peraturan DPR Nomor 1/2014 yang merupakan hal yang terkait pelaksanaan rapat yang dapat dilakukan secara virtual, maka rapat hari ini kuorum terhitung dari yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Mengenai hal yang terkait rapat ini bisa dinyatakan terbuka atau tertutup, kalau memang dinyatakan terbuka pelaksanaan rapat dilakukan secara *live streaming* oleh TV Parlemen, sedangkan media cetak dan media elektronik mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen.

Dan berdasarkan Pasal 249 Ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa hal yang menyangkut kepentingan administratif setiap anggota yang mendatangi daftar hadir sebelum menghadiri rapat karena kondisi yang ada, maka daftar hadir anggota dapat dilakukan secara elektronik. Kehadiran anggota tercatat di dalam list partisipasi aplikasi Zoom.

Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Saya juga perlu menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pembatasan secara fisik, kami telah sepakat mengenai tata cara yang dilakukan dalam rapat ini, semua dilaksanakan secara terkait secara protokol kesehatan secara ketat. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin, rapat seefisien mungkin, dan seefektif mungkin bisa 2 setengah jam kita lakukan. Dan hal yang terkait dengan tanya jawab nanti kita akan meminta kepada kawan-kawan Anggota yang hadir maupun secara virtual mentaati waktu yang

ada. Terkait dengan materi rapat hari ini dan lalu lintas rapat kita lakukan dengan mekanisme rapat secara fisik maupun secara virtual.

Menurut laporan dari Sekretariat Komsis VI, Rapat Kerja hari ini telah dihadiri keseluruhan fraksi 7 fraksi, dan anggota yang mendatangi secara fisik maupun secara virtual ada 20. Tata Tertib Pasal 281 Ayat (1) maka kuorum telah terpenuhi dan rapat hari ini saya nyatakan terbuka untuk umum atau nanti kalau nanti ada yang dinyatakan tertutup. Kami persilakan mitra untuk menyampaikan hal-hal yang masih sensitif untuk tidak terbuka secara umum, mitra kerja dalam hal ini Menteri BUMN untuk menyampaikan keinginan pembahasan atau penyampaian secara tertutup.

Dengan demikian keinginan kita adalah bagaimana Komitmen Kementerian BUMN sebagai Pembina BUMN dan BUMN sebagai mitra daripada pelaku usaha kecil menengah mikro, dan komitmen kita untuk selalu memberikan dukungan kepada UMKM maka rapat hari ini bersama Menteri BUMN terkait materi mengenai hal-hal yang menyangkut keinginan pembahasan integrasi BUMN segmen ultra mikro dapat saya buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Saudara Menteri BUMN atas kesediaan waktunya untuk menghadiri raker pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah kami sampaikan agenda rapat hari ini adalah mengenai Rencana Pembentukan Holding Ultra Mikro, ultra mikro ya, yang yang ingin kami dengarkan paparan oleh Saudara Menteri dan tentunya paparan itu merupakan sesuatu hal yang terkait dengan keinginan untuk mendapatkan persetujuan politik di dalam rapat hari ini. Kita minta persetujuan dari kawan-kawan apakah kita bisa sepakati sampai pukul 12 dulu rapat kita setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Seperti kita ketahui hal terkait pasca Covid atau *recovery* Covid dalam pemulihan ekonomi nasional struktur perekonomian nasional, salah satunya sangat ditopang oleh sektor Ultra Mikro ya. Diperkirakan ada lebih 40 juta pelaku usaha atau pekerja di Segmen Ultra Mikro Indonesia. Dari jumlah tersebut mayoritas pelaku di Sektor Ultra Mikro belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Sehubungan hal tersebut pembentukan ekosistem ultra mikro yang berkualitas sangat penting dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas pengusaha ultra mikro melalui pemberdayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut peran Badan Usaha Milik Negara di Indonesia sangat diperlukan, pembentukan ekosistem ultra mikro yang kuat memerlukan dukungan dari BUMN yang akan dilakukan melalui integrasi 3 BUMN, baik segmen ultra mikro yaitu Bank BRI terbuka yang akan fokus pada *micro banking*, PT Pegadaian fokus kepada pembiayaan secara gadai, serta PT Permodalan Nasional Madani yang akan fokus pada pembiayaan kelompok.

Diharapkan melalui dukungan integrasi BUMN di segmen ultra mikro tersebut para pelaku atau pengusaha di segmen ultra mikro akan memiliki akses pendanaan ke lembaga keuangan formal yang lebih baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan daya saing pelaku segmen ultra mikro yang mendukung penguatan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan topik ultra mikro di atas, dalam kesempatan ini kami Komisi VI ingin mendengarkan secara langsung *roadmap* dan *progress* yang telah dilakukan dan integrasi BUMN dari Segmen Ultra Mikro, yang mana progress pembentukan Holding Ultra Mikro tentunya beserta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam proses integrasi tersebut. Kami juga perlu menyampaikan dalam forum ini hal-hal yang dicatat dari berbagai diskusi di internal Komisi VI, akses dan integrasi yang kita harapkan makin banyak UMKM yang terakses di lembaga ultra mikro ini, yang data base keuangan non-bank, kita tentu akan bersifat atau akan bisa terbuka Pak Menteri, melalui berbagai integrasi data yang ada.

Data di dunia internasional akan mengerti persis berbagai hal kekuatan riil ekonomi Indonesia yang sebenarnya, dengan kolaborasi ini akan terlihat entitas yang spesifik di pelaku usaha kecil menengah mikro yang bisa itu memberi penguatan hal yang terkait dengan gagasan-gagasan besar pemerintah melalui UMKM itu bisa terwujud, atau bahkan sebaliknya juga, ini menjadi perhatian kita. Kalau dulu pelaku usaha kecil menengah mikro itu tidak masuk di dalam suatu entitas yang terakses dengan sistem keuangan global, tapi dengan integrasi ultra mikro ini akses data UMKM akan terakses dalam sistem keuangan global dan itu bisa menjadi sesuatu yang memang akan memberi penguatan hal-hal yang terkait dengan usaha kita memperkuat UMKM, atau pun bisa juga hal yang sebaliknya.

Ini menjadi catatan kawan-kawan Komisi VI dalam diskusi dan kita juga sangat berharap hal-hal semacam ini akan merupakan bagian yang dibahas juga di dalam roadmap dan progress dalam melakukan integrasi BUMN Ultra Mikro ini yang tentunya Kementerian BUMN mempunyai suatu permasalahan-permasalahan dari penting sampai tidak penting beserta kendala-kendala yang dihadapi.

Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Menteri untuk memberikan satu penjelasan, menyampaikan penjelasan lebih lanjut sesuai dengan agenda hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera.

Om swastiastu.

Namo budhaya.

Salam kebaikan.

Terima kasih Pimpinan Komisi VI yang hadir hari ini dalam mengundang kami dan tentu dan para Wakil Rakyat Komisi VI yang hari ini juga hadir dalam rencana paparan daripada pembangunan ekosistem ultra

mikro. Adapun seperti yang kita ketahui bersama dengan kondisi Covid-19 saat ini dan juga bagaimana perubahan *landscape* daripada ekonomi digital, suka tidak suka perubahan daripada pasar yang ada di ultra mikro atau UMKM tentu menjadi sesuatu tekanan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat keseimbangan pasar sendiri dengan adanya harga-harga yang di *dumping* dari luar negeri dan ini menjadi *concern* tersendiri bagaimana UMKM ultra mikro bisa bersaing secara terbuka. Nah, tentu kami sesuai dengan arahan daripada pemerintah, bagaimana kami juga sebagai Kementerian BUMN harus bisa mencarikan solusi 3 hal dalam pembangunan ultra mikro dan UMKM, yaitu pembiayaan, akses pasar dan tentunya infrastruktur, bagaimana kita punya keberpihakan kepada ultra mikro sendiri.

Beberapa program kami yang sudah kami luncurkan salah satunya tentu pada UMKM, di mana kita membuka akses kepada tadi para ultra mikro UMKM untuk menjadi *supplier* daripada para BUMN membutuhkan *support* daripada barang-barang yang ada. Tentu catatan daripada UMKM sendiri kalau kita lihat masih juga ada beberapa barang asing yang masuk. Nah karena itu kita juga sekarang-sekarang memperkuat daripada TKDN-nya. Lain juga kita memperbaiki Sarinah, daripada Sarinah ini bagaimana Sarinah juga menjadi tulang punggung daripada *brand local* dan Insya Allah Bapak Ibu dapat menyaksikan nanti pada tanggal November, bagaimana Sarinah yang baru bisa menjadi bagian pembangunan daripada UMKM *brand local* atau ultra mikro. Nah tentunya pada hari ini kami terima kasih ingin memaparkan khususnya kepada sinergisitas daripada PNM, Pengadaan dan BRI untuk membangun ekosistem ultra mikro sendiri.

Ada beberapa hal penting yang kami sampaikan bahwa satu, bagaimana model bisnis ekosistem ultra mikro akan fokus pada pemberdayaan bisnis melalui PNM dan juga pengembangan bisnis melalui Pengadaan dan BRI, untuk menjembatani usaha mikro naik kelas, itu yang terpenting, usaha mikro bisa naik kelas, sehingga bisa memasuki tahapan yang lebih tinggi. Jadi tidak yang kecil tetap kecil, yang kaya makin kaya, tapi bagaimana yang kecil bisa ke menengah ini yang kita coba sama-sama lakukan.

Tentu hal yang lain lagi yang terpenting juga ekosistem daripada ultra mikro ini ingin memastikan bahwa terdapatnya penurunan daripada bunga pinjaman kepada nasabah. Ini menjadi konteks saya rasa selama ini juga menjadi hambatan bagaimana ultra mikro UMKN tidak mendapatkan bunga yang lebih baik. Alhamdulillah daripada audiensi kami dan rapat-rapat yang di berbagai pihak, saat ini kami sudah mendapatkan dukungan dari OJK dan Bank Indonesia, LPS, KSK dan juga terakhir dirapatkan di Komite Privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perkonomian sebagai pimpinan dari komite tersebut, kita sudah sosialisasi dan mendapat persetujuan ini. Nah karena itu Pimpinan DPR dan para Perwakilan Rakyat terhormat pada saat ini kami akan memaparkan lebih detail lagi dan Insya Allah nanti kami terbuka dengan isu-isu atau tanya jawab yang akan dilakukan.

Mohon juga diberikan kesempatan untuk Pak Wamen saya Pak Tiko melanjutkan paparan. Silakan Bapak Tiko.

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMOJO):

Terima kasih Pak Menteri.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, Pak Demer, Pak Aria Bima, Pak Haikal, dan yang hadir *online* serta Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati Bapak Ibu.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Nah, saya karena sudah paparan beberapa kali dalam konteks FGD, hari ini ijin untuk kita fokus pada isu-isu yang mengemuka pada waktu FGD. Dan tentunya nanti kami akan meminta juga bantuan dari para Dirut, Pak Sunarso Dirut BRI, Pak Kuswiyoto Dirut Pegadaian, dan Pak Arief Dirut PNM, untuk menjelaskan secara lebih rinci isu-isu yang selama ini menjadi *concern* dan mengemuka dalam berbagai diskusi yang kami lakukan baik secara berkelompok di FGD, maupun *one on one* dengan Bapak Ibu sekalian.

Bapak, Ibu.

Tiga (3) hal yang kami sampaikan diawal, bahwa kami sekali lagi menyakini bahwa integrasi bisnis dari 3 perusahaan ini yaitu BRI, Pegadaian PNM dengan tetap menjaga bisnis model masing-masing di mana BRI tetap berfokus di kredit usaha rakyat, Pegadaian tetap fokus diproduk gadai dan PNM tetap fokus diproduk pemberdayaan Mekaar. Ini akan mampu menjangkau masyarakat luas dengan jaringan yang terintegrasi.

Sebagaimana kami sampaikan dalam berbagai FGD bahwa pada saat ini ada piramid usaha di Indonesia di mana sebenarnya di segmen terbawah ini ada 60 juta nasabah Ultra Mikro, yang saat ini baru setengahnya yang mempunyai akses kepada pembiayaan formal. Oleh karena itu, ke depan untuk bisa memperdayakan dan memberi akses keuangan yang formal dengan biaya yang lebih murah tentunya jangkauan ini jadi kunci utama.

Oleh karena itu, kami meyakini bahwa integrasi 3 lintas usaha ini bisa memberikan layanan usaha yang semakin lengkap, terintegrasi dan luas sehingga targetnya dalam 4 tahun ke depan kita bisa meng-*on board* sekitar 30 juta nasabah baru di 3 entitas bisnis ini secara terintegrasi. Di saat ini pun kami juga sudah melakukan *piloting* dalam bentuk *co-location* di mana cabang-cabang unit desa BRI ke depan akan dilengkapi dengan loket untuk Pegadaian, bagaimana masyarakat bisa menggadaikan barangnya maupun juga menjadi pos untuk para AO dari Mekaar, yang nantinya akan menjangkau pemberdayaan untuk masyarakat khususnya ibu-ibu dengan konsep *social lending*.

Nah, isu keduanya yang kami akan *addressed* mengenai efisiensi, di mana kami sudah melakukan berbagai simulasi dan sudah ada KPI-nya, bahwa nantinya kita meyakini bahwa *cost of fund* itu pasti akan bisa turun cepat. Saat ini *cost of fund* BRI itu sekitar 2,3%, sementara kalau kita melihat pembiayaan di PNM dan Pegadaian saat ini masih tergantung pada pasar modal, di mana biaya dana di Pegadaian di sekitar 6 sampai 7%, dan biaya dana di PNM di kisaran 9 sampai 10%. Dan tentunya dengan nantinya pembiayaan ini sebagian besar akan didukung dengan *funding* daripada dana pihak ketiga di BRI tentunya *cost of fund* dari PNM, Pegadaian bisa turun

cukup signifikan dan ini diharapkan nanti *pass on* kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah.

Efisiensi lain adalah dalam konteks efisiensi jaringan, di mana sebagai contoh Pegadaian ke depan untuk ekspansi ke depan tidak perlu lagi menyewa ataupun membangun kantor-kantor baru, tetapi bisa menempel pada Unit-unit Desa BRI, cukup membangun *counter* dan *save deposit* untuk menyimpan emas atau barang gadai lainnya, sehingga biaya pembukaan Kantor Pegadaian ke depan akan jauh lebih murah.

Dari konteks Mekaar saat ini AO yang ada di PNM yang jumlahnya sekitar 40.000 lebih itu nanti akan kita lengkapi dengan *device* digital dan bisa terkoneksi dengan BRI dalam konteks Unit Desa BRI maupun agen BRI, sehingga nantinya juga bisa menimbulkan efisiensi karena tidak harus ratio AO terhadap nasabah di Mekaar bisa kita kurangi dengan digitalisasi dan dengan interkoneksi dengan cabang dan unit agen BRI. Ini tentunya juga akan mengkontribusikan nantinya kepada efisiensi biaya *overhead*. Saat ini memang biaya *overhead* sebagai contoh di PNM memang tinggi, ini kita harapkan dalam 3 tahun ke depan bisa menurun secara signifikan dengan integrasi ini.

Yang ke-3, yang kami ingin soroti adalah terkait dengan implikasi kepada pegawai, karena kami memahami banyak masukan Pegadaian, PNM mengenai kekhawatiran pegawai. Kami menyakinkan sekali lagi bahwa tidak ada pengaruh kepegawaian kepada Pegadaian dan PNM, tidak ada pengurangan pegawai, tidak ada pengurangan *benefit*, semua berjalan seperti apa adanya bahkan kami menyakini dengan efisiensi yang kita capai di *cost of fund* dan di *cost of serve* tadi kita bisa *mem-pass on* itu juga sebagai kenaikan *benefit* buat PNM dan Pegadaian, karena kami menyakini laba Pegadaian dan PNM ke depan akan meningkat, karena tentunya dengan sebagian biaya tadi dikurangi Pegadaian dan PNM bisa menikmati kenaikan laba tentunya nanti bisa di-*pass on* juga kepada *benefit* dari karyawannya.

Jadi ini tentunya kami terus komunikasikan. Mohon maaf memang di awal-awal ini masih banyak keraguan di pegawai, kita terus komunikasikan meyakinkan pegawai bahwa *holding* ini bukan hanya ber-*benefit* bisnis, tapi juga ber-*benefit* kepada para karyawannya nanti ke depan. Jadi itu yang garis besar yang akan *addressed* hari ini sesuai dengan berbagai diskusi dengan Bapak Ibu sekalian.

Saya mohon ijin saya minta tadi berturut-turut Pak Sunarso, Pak Kuswiyoto, Pak Arief untuk menyampaikannya secara lebih detail, silakan Pak Sunarso.

DIREKTUR UTAMA BRI (SUNARSO):

Terima kasih Pak Wamen.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI DPRRI dan seluruh jajaran Komisi VI DPRRI.

Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Pak Wamen Pak Tiko, dan juga seluruh jajaran dari Kementerian BUMN, serta Rekan-rekan dari BRI, Pegadaian, dan PNM, dan hadirin sekalian.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.

Namo budhaya.

Salam kebajikan.

Izinkan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebenarnya beberapa hal sudah tadi di-*mention* oleh Pak Menteri maupun Pak Wamen bahwa tujuan daripada pembentukan. Sebenarnya inisiatif ini sesungguhnya adalah membentuk ekosistem, membentuk ekosistem yang supaya bisa melayani dari mulai ultra mikro, mikro kecil dan menengah, secara apa namanya tersistem, secara dalam ekosistem. Dan kemudian tujuan utamanya adalah sebenarnya memajukan Indonesia dengan memperluas jangkauan, memperdalam layanan, dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, maka kemudian ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan di sini.

Pertama adalah menyangkut masalah data bahwa ternyata dari riset kami itu saat ini terdapat kurang lebih 64% dari total jumlah entitas usaha di Indonesia itu, itu bergerak di ultra mikro. Jadi segmennya masuk ultra mikro, itu 64%, itu ada gambarnya di situ di piramid itu, dan belum juga menjadi target utama dari sebagian besar lembaga keuangan formal. Jadi hanya 3 lembaga keuangan formal, kebetulan semuanya BUMN, yaitu: BRI, Pegadaian, dan PNM yang sudah memiliki bisnis model yang khusus untuk menasar segmen mikro dan ultra mikro ini.

Poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa tujuan daripada ekosistem ini adalah untuk memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju industri keuangan melalui proses pembiayaan yang berkelanjutan, yang dengan target sasaran adalah 57 juta nasabah ultra mikro, di mana berdasarkan riset kami bahwa 30 juta di antaranya itu memang sama sekali belum memiliki akses pembiayaan, masih ada data yang sebagian sudah memiliki akses pembiayaan tetapi belum cukup, yang sudah cukup dan sudah memiliki akses pembiayaan dan sudah cukup itu hanya 20%. Dan kemudian yang sudah memiliki akses pembiayaan tapi belum cukup itu antara lain dilayani memang lembaga formal, dan kemudian ada juga 5 juta di antaranya itu masih mengandalkan.

INTERUPSI F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Nasro, saya interupsi dulu, Pak Ketua ini ada enggak penjelasannya di materi ini ya?

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Dibagikan Pak.

DIREKTUR UTAMA BRI (SUNARSO):

Lampirannya, di lampirannya.

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Lampiran ya.

DIREKTUR UTAMA BRI (SUNARSO):

Nanti kita tambahkan Pak mohon izin. Mohon izin bisa kami lanjutkan.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, MSi):

Tolong dipercepat ya, susulannya dipercepat ya.

DIREKTUR UTAMA BRI (SUNARSO):

Baik, jadi kami lanjutkan.

Bahwa antara lain memang masih ada 5 juta usaha ultra mikro ini yang masih dilayani oleh *loan shark* atau rentenir dengan kisaran suku bunga itu antara 100 sampai 500%. Bahkan dan kemudian ada 7 juta yang masih mengandalkan kerabat, dan ada 18 juta yang memang belum sama sekali tersentuh oleh lembaga keuangan begitu. Dan kemudian ekosistem ini nanti diharapkan mampu memperkuat bisnis Pegadaian dan PNM melalui mekanisme penurunan *cost of fund* dan juga penurunan biaya operasional.

Nah penurunan *cost of fund*-nya melalui bisa mendapatkan akses pendanaan langsung dari BRI, karena *cost of fund* BRI pasti lebih murah, karena memang BRI diperbolehkan untuk mengambil dana masyarakat secara langsung, kemudian bisa juga dengan menerbitkan instrumen yang dijamin oleh BRI dan mungkin kombinasi di antara keduanya, dan kemudian juga bisa menurunkan biaya operasional melalui penggunaan infrastruktur-infrastruktur jaringan secara bersama-sama, sehingga apabila mau memperluas jaringan tidak perlu masing-masing investasi sendiri-sendiri dan kemudian sebenarnya tujuan penggunaannya sama itu, jadi investasinya cukup satu tapi bisa digunakan untuk bertiga.

Kemudian point 4 yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ekosistem ini juga sebenarnya ingin membantu mempercepat proses tercapainya inklusi keuangan di level 90% sekarang masih berada di kisaran 70%.

Dan kemudian yang poin berikutnya adalah bahwa model bisnis ekosistem ini akan fokus kepada pertama adalah, masyarakat yang memang belum *fully* komersial gitu yang sering disebut *unbankable*, *unvisible*, itu akan disentuh oleh PNM melalui *social group lending* melalui pemberdayaan dan apabila sudah memenuhi kaidah-kaidah ataupun kriteria komersial, mereka bisa melanjutkan meningkatkan usahanya dengan mengakses pendanaan dengan 2 alternatif. Alternatif pertama adalah kalau mereka mau minta pinjaman tapi mengandalkan jaminan yang kita sebut *collateral base* itu ke Pegadaian, dengan hukum perikatan gadai gitu. Jadi itu adalah meminta

pinjaman, meminjam uang tetapi memang yang didasarkan pada menggadaikan barang ataupun *collateral* yang dimiliki. Lah kemudian apabila lebih lanjut dari situ masih ada pilihan lain, yaitu tidak harus membawa barangnya itu tetapi cukup membawa sertifikat atau pun dianalisa proyeksi *cashflow*-nya dan kemudian lembaga pembiayaan memberikan pinjaman yang kita sebut fidusia *base lending* dan itulah kerjanya bank, sehingga memang secara berkesinambungan, berurutan, proses pemberdayaan UMKM naik kelas ini memang menjadi terstruktur dan sistematis, kira-kira seperti itu, itu yang ingin kita capai dari inisiatif ini. Makanya kemudian proses naik kelasnya pun bisa di-*tracking* dan kemudian *database*-nya pun bisa diintegrasikan.

Yang poin ke-6 adalah dengan model seperti itu kami memiliki aspirasi bahwa di tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan kita bisa melayani nasabah baru tuh 29 juta di 4 segmen nasabah prioritas melalui empat model bisnis yang tadi saya sampaikan, dan ini akan signifikan meningkatkan aksesibilitas usaha mikro melalui jaringan distribusi dan juga melalui data, *tracking* segala macam yang terintegrasi.

Poin ke-7 adalah bahwa integrasi ketiga entitas BUMN ini akan membentuk ekosistem, sekali lagi memang inisiatif ini sesungguhnya adalah pembentukan ekosistem untuk menjaga, mempertahankan, pendekatan pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh PNM dan model bisnis yang dilakukan oleh Pegadaian yang tadi saya katakan *collateral base*, dan kemudian juga bisa dilanjutkan ke fidusia *base lending* dan transaksi-transaksi layanan keuangan yang lain melalui bank gitu. Jadi masing-masing akan lebih fokus di *core business*-nya masing-masing, mengikuti bisnis modelnya masing-masing tetapi kemudian disambung, diikat melalui ekosistem ini sehingga menjadi proses naik kelasnya, proses akuisisi nasabah baru itu menjadi sangat terstruktur.

Kemudian yang terakhir adalah bahwa yang penting adalah apakah nanti ekosistem ini hanya tunduk pada peraturan perbankan? Jawabannya adalah tidak. Karena ini bukan merger, ini adalah pembentukan ekosistem yang diikat melalui kepemilikan di-*holding*. Jadi karena bukan merger maka entitas Pegadaian tetap Pegadaian, entitas PNM tetap PNM dengan bisnis modelnya masing-masing dan tunduk pada aturan yang mengatur pola bisnis masing-masing. Saya tegaskan di sini bahwa gadai dan PNM ya tunduk pada aturan OJK yang mengatur industri keuangan non-bank, sedangkan BRI ya tunduk pada aturan OJK dan BI dan lain-lain yang mengatur bisnis perbankan.

Demikian yang bisa kami sampaikan tapi mohon dilengkapi oleh rekan-rekan dari PNM Pak Arief Mulyadi. Kami persilakan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Pak Kus dulu, silakan Pak Kus.

DIREKTUR UTAMA BRI (SUNARSO):

Pak Arif dulu Pak.

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Silahkan Pak Arief.

DIRUT PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (ARIEF MULYADI):

Terima kasih, Pak Wamen.

Yang terhormat Pimpinan Aria Bima, Pak Demer dan Pak Haikal.

Bapak Ibu Anggota Komisi VI baik yang hadir maupun yang *online*.

Pak Menteri, Pak Wamen, jajaran Kementerian BUMN.

Rekan-rekan BRI, dan Pegadaian dan PNM.

Saya hanya akan menambahkan sedikit memperkuat apa yang sudah disampaikan Pak Menteri, Pak Wamen dan Pak Narso. Jadi kami bertiga nanti akan menyasar 30 juta *existing* pelaku usaha ultra mikro yang saat ini masih belum memiliki akses pendanaan dari lembaga keuangan formal dan tentunya karena dalam satu ekosistem, terintegrasi, ada upaya-upaya untuk penurunan suku bunga yang saat ini kami berikan kepada nasabah dan layanan yang lebih terintegrasi. Dan sebagaimana yang telah disampaikan juga bahwa model bisnis, eksistensi, entitas, baik PNM, Pegadaian, akan tetap seperti semula dengan regulasi yang mengaturnya juga tetap seperti apa adanya, tidak masuk, tidak dirubah menjadi regulasi perbankan, namun saling memperkuat dan diperkuat, apa yang sudah kami lakukan akan terus di-*improve* dengan adanya sinergi yang terbangun.

Peran, peran pemberdayaan tadi seperti yang disampaikan tetap diawali oleh kami oleh PNM untuk strata yang *invisible* dan *unbankable* yang mayoritas didominasi oleh masyarakat kelas prasejahtera yang tadinya hanya berupa kegiatan subsistem, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan dasar hidupnya, kami dorong menjadi wirausaha, wirausahaan yang lebih mandiri, dan setelah diberdayakan dalam bentuk kelompok tersebut dilanjutkan dengan model pemberdayaan dan pembiayaan yang akan diberikan oleh BRI dan Pegadaian.

Ekosistem ini juga akan menciptakan efisiensi bisnis, yaitu antara lain banyak infrastruktur, *resources*, yang ada di kami bertiga akan kami dapat kami manfaatkan bersama, di antaranya adalah *co-location* untuk jaringan kantor, kemudian adanya satu super *apps* yang menjadi pendukung kerja karyawan kami dalam melakukan pembiayaan dan pemberdayaan, termasuk pemasaran, dan pemanfaatan agen BRILink, sehingga segmen ultra mikro yang akan kami sasar akan lebih efektif dan optimal. Ada beberapa komponen yang bisa kami turunkan dengan sinergi dalam ekosistem ini, yaitu antara lain *cost of fund*, tadi dengan pemanfaatan infrastruktur dan *resources* juga akan ada penurunan *Opex*, penurunan biaya kredit dan sebagainya. Dan tentunya karena kami entitas bisnis juga selain memiliki tugas pemberdayaan, *outstanding* pinjaman, dengan peningkatan *outstanding*

pinjaman semakin besarnya portofolio pembiayaan yang kami salurkan, akan memberikan tambahan *benefit* untuk *corporate* masing-masing. Untuk nasabah, ini juga tidak kami lupakan, bahwa dengan adanya sinergi dalam ekosistem ini paling tidak atau sedikitnya untuk Pegadaian akan dapat menurunkan suku bunga kepada nasabah itu sebesar 1%, dan untuk nasabah Mekaar PNM, selain penurunan yang organik dilakukan dengan peningkatan plafon pembiayaan juga akan dengan adanya sinergi ini akan ada tambahan penurunan bunga minimal 3% dari yang ada saat ini. Terutama untuk nasabah-nasabah baru yang kami akuisisi, dan ini juga bisa terjadi karena adanya apa sinergi infrastruktur dan *resources* yang kami miliki bersama, tentunya nasabah akan mendapatkan *benefit* dengan akses pendanaan yang lebih murah dan lebih cepat.

Sinergi ekosistem ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru, karena tadi seperti saya sampaikan bahwa dari awal masyarakat pra sejahtera yang akan kami biayai dan berdayakan hanya merupakan kegiatan subsistem. Selanjutnya dengan kegiatan yang lebih terstruktur, pembinaan yang terintegrasi, mereka akan lebih cepat naik kelas, dan kenaikan kelas ini akan memperbesar usaha mereka sehingga juga bisa menyerap tenaga kerja. Hal ini tidak hanya, tidak hanya seperti saat ini yang kami hanya mendorong nasabah BRI saling bersinergi dengan nasabah BRI, nasabah PNM sinergi dengan sesama nasabah PNM, begitu juga dengan Pegadaian.

Dalam sebuah ekosistem yang lebih besar nasabah PNM bisa juga didukung atau kita, kita sinergikan proses usahanya dengan nasabah BRI yang jauh lebih besar, sehingga percepatan naik kelas yang terstruktur akan bisa terealisasi. Dan sudah menjadi komitmen kami bahwa pemberdayaan dan pembiayaan akan berjalan secara berkesinambungan. Contohnya nasabah Mekaar paling tidak setelah 3 kali siklus pembiayaan, akan kami naik kelas kan, baik itu menjadi nasabah KUR mikro ataupun nasabah Pegadaian dengan produk cepat gadai.

Dan proses naik kelas tersebut nantinya dapat dilayani dengan mudah dan terstruktur karena nasabah yang telah masuk ekosistem UMi ini telah teridentifikasi dan terpantau proses perkembangan bisnisnya. Untuk pemberian pembiayaan diberikut juga akan bisa dilakukan dengan *pre-approval*. Dan manfaat lain atas ekosistem ini adalah kemudahan akses layanan keuangan, jadi para pelaku usaha ultra mikro Indonesia nantinya akan dapat mengakses layanan keuangan, baik pembiayaan maupun layanan keuangan lainnya dengan proses layanan yang lebih cepat melalui UMi super *apps* tadi, dan *co-location* kantor kami serta lebih mudah melalui pendampingan dan pemberdayaan usaha dan beragam produk dan *channel* keuangan lainnya, yang saat ini masih sangat minim sekali bisa dilakukan, bisa dirasakan oleh para pelaku ultra mikro.

Hal-hal tersebut bisa Insya Allah bisa kami layani, bisa kami lakukan, bisa kami realisasikan bersama, karena saat ini saja kami punya lebih dari 61.000 tenaga pemasar dalam satu ekosistem nantinya, menjadi sesuatu kekuatan yang besar, mempunyai, dan ada lebih dari 16.000 *outlet* di 34 provinsi serta lebih dari 500 ribu agen yang hadir.

Mungkin itu Pak Wamen bisa saya sampaikan. Saya kembalikan Pak Wamen.

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Silakan Pak Kus.

DIRUT PT PEGADAIAN PERSERO (KUSWIYOTO):

Terima kasih Pak Wamen.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan sidang, Pak Aria Bima, Pak Demer, dan Pak Haikal, juga

Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati baik yang *offline* maupun yang *online*,

Pak Menteri, Pak Wamen, dan

Bapak Ibu dari Kementerian juga Bapak Narso, Pak Catur dari BRI, Pak Arief dari PNM, dan

Teman-teman semua.

Izinkan saya melanjutkan yang disampaikan Pak Narso dan Pak Arief tadi mengenai *concern-concern* yang selama ini sering kita diskusikan.

Jadi menyambung yang disampaikan Pak Narso dan Pak Arief juga tadi Pak Menteri dan Pak Wamen, ada berapa *concern* yang akan yang menjadi, setelah Bapak Ibu sampaikan yang pertama dan jumlah capaian target nasabah UMi, Jadi Bapak, Ibu sekalian pada tahun 2024 nanti akan terdapat 29 juta usaha UMi yang menjadi bagian dari ekosistem UMi, di mana kalau dibiarkan nanti akan memberikan kontribusi sebanyak 11 juta.

Hal ini adalah naik tiga setengah juta karena dampak sinergi dari Pegadaian nanti akan ada 5 juta nasabah UMi, dimana 1 jutanya merupakan tambahan karena dampak sinergi, dan dari PNM ada sekitar 15 juta nasabah, dimana tambahnya satu juta. Jadi kalau dihitungkan jumlahnya memang 31, tetapi ternyata ada *overlap*, kami perkirakan ada *overlap* dari jumlah nasabah yang memiliki pembiayaan, mendapatkan pembiayaan dari ketika pihak ini kemungkinan sebesar 2 juta, sehingga total yang bisa kita layani adalah 29 juta.

Sinergi ini juga akan memberikan adanya apa persaingan usaha yang semakin kondusif karena ekosistem UMi akan membentuk iklim persaingan *sell*, karena tujuan utama dari pada ekosistem UMi ini adalah meng-*on holding*-kan usaha UMi yang belum memiliki akses pendanaan sama sekali. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Tiko dan Pak Narso ada 18 juta kira-kira yang belum terlayani. Ini adalah hal yang memang menjadi tujuan kita semua supaya mereka mendapatkan layanan industri keuangan yang formal.

Di sisi lain lembaga keuangan lain seperti BPR dan BPD akan mendapatkan manfaat dengan adanya tersistemnya nasabah UMi ini untuk potensi perluasan akses keuangan kepada segmen UMi. Selain itu, ini yang mungkin menjadi *concern* juga adalah para rentenir juga sebenarnya dapat diberdayakan dengan adanya ekosistem UMi ini melalui kolaborasi sebagai agen BRILink.

Selanjutnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Wamen, Bapak Ibu sekalian dampaknya terhadap para pekerja Pegadaian dan PNM. Ekosistem UMi ini akan memberikan kesempatan yang luas bagi pekerja Pegadaian dan PNM untuk pengembangan kapabilitas dan karir lintas entitas. Jadi nanti akan semakin banyak membuka peluang untuk berkarir sehingga ini akan membuat teman-teman semua bisa lebih memiliki karir *path* yang lebih luas disesuaikan tentunya dengan aspirasi dan kebutuhan daripada organisasi.

Selanjutnya ada tiga komponen utama dalam proses akuisisi nasabah melalui *cross selling product* dari masing-masing entitas, yaitu seperti tadi Pak Arief sudah menyampaikan bahwa proses akuisisi nasabah ini dipercepat melalui UMi super *apps* yang terintegrasi di *sales platform* di masing-masing entitas, kalau di BRI ada BRI Spot, di Pegadaian ada Selena, dan di PT PNM ada Inisiasi Mekaar. Juga ada sinergi *co-location* di unit kerja BRI sehingga dapat melayani kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan dari Pegadaian dan PNM.

Jadi Bapak Ibu sekalian *co-location* ini merupakan salah satu hal yang memang kami dari Pegadaian sangat menunggu, karena *outlets* kami yang memang sangat terbatas sehingga dengan adanya sinergi *co-location* ini ini kita dapat mengembangkan *outlet* tanpa kita mengeluarkan biaya *operate cost* yang besar. Penghematannya sangat besar kalau ada kalau *co-location* ini, sehingga kita daya jangkau kita juga akan lebih bagus untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pembiayaan kepada kami.

Selanjutnya pemanfaatan agen BRILink sebagai *channel* layanan Pegadaian seperti tabungan emas dan PNL seperti penyetoran pinjaman *cash pooling* dan peran ketua kelompok sebagai agen BRILink. Jadi kalau Bapak, Ibu pastinya sudah mengetahui bahwa BRI memiliki hampir 500 ribu agen BRILink, dan itu kalau menjadi agen dari Pegadaian dan PNM maka memberikan dampak yang sangat luar biasa, karena biaya yang kami keluarkan dalam *variable cost* tidak ada *fixed cost* di sana, itu akan sangat membantu peningkatan kinerja kami semuanya. Dan selanjutnya adalah kira-kira bagaimana sih dampaknya ke depan terhadap ketiga entitas ini dengan adanya integrasi ini.

Kalau total aset nanti kami perkirakan di tahun 2024 tanpa adanya ekosistem dari integrasi ini ini total aset diperkirakan 2,187 triliun, tapi dengan adanya ekosistem yang baru naik 48 triliun menjadi 2,235 triliun. Laba juga demikian naik lumayan besar dari 74,5 triliun diversikan adanya tambahan 8,4 triliun menjadi 82,9 triliun. Kontribusi pajak negara, jadi tanpa ekosistem 18,2 triliun, dengan adanya ekosistem yang baru menjadi 19,9 triliun, dan distribusi deviden kepada negara naik 1 triliun dari 19,4 menjadi 20,4 triliun.

Demikian kami sampaikan.

Saya kembalikan kepada Pak Wamen.

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Baik Bapak, Ibu.

Kami lanjut lagi beberapa hal. Kami telah mendapatkan dukungan dari seluruh regulator dari OJK dengan beberapa pertemuan telah didapatkan dukungan, dan ada beberapa poin yang diminta untuk dipastikan ke depan. Pertama adalah kesiapan ekosistem dalam penerapan PSA 71, ini kaitannya dengan percadangan dan penyatuan konsentrasi keuangan. Yang kedua mengenai *executive committee* dimana diharapkan nantinya *tracking* dari KPI ultra mikro *holding* ini bisa dilakukan melalui *executive committee* yang akan kami pimpin langsung.

Kemudian ada satu anak perusahaan di Pegadaian yang diminta pengecualian untuk divestasi ke depan yaitu Galeri 24 yang adalah anak perusahaan Pegadaian dalam hal jual beli emas. Kemudian dipastikan juga bahwa pada waktu pelaksanaan *right issue*, evaluasi saham Pegadaian PNM adalah evaluasi yang wajar, dan telah dapat perlindungan kepada pemegang saham minoritas, dalam kaitannya dengan pemegang saham minoritas dari BRI Tbk. Dan dari BI mendapatkan persetujuan dengan catatan, dipertahankan diversifikasi dari sumber pendanaan PNM Pegadaian. Jadi selain dari sumber pendanaan BRI dan diharapkan Pegadaian PNM tetap mempunyai sumber pendanaan lain, sehingga ada diversifikasi seperti dari *bond* dan lain-lain.

Kemudian upaya naik kelas, yang dicitrakan sesuai UMKM diharapkan memperkuat *payment* sistem nasional, karena tentunya BI ingin inklusi keuangan khususnya penerapan dari QRS bisa berjalan di seluruh pelosok, termasuk di desa-desa. Kemudian dari LPS beberapa catatan, yaitu diharapkan ekosistem ini bisa menjadi mitra juga bagi lembaga keuangan seperti BPR, sehingga tidak mematikan BPR ke depan dan akan pastikan tidak bertentangan dengan praktek monopoli. Dan dari KSSK, secara bersama-sama telah memberikan persetujuan juga dengan memastikan juga bahwa pelaksanaan ultra mikro ini tidak menimbulkan resiko sistemik bagi perbankan nasional.

Dan terakhir dari Kementerian Koperasi dipimpin oleh Pak Menko telah memberikan persetujuan dengan catatan *right issue* BRI nantinya akan diikuti oleh pemerintah dengan cara menyetorkan Saham Seri B Negara, dalam hal pemilikan negara di Pegadaian dan PNM, dan kemudian akan ada saham minoritas yang akan ditawarkan HMETD kepada publik untuk bisa dibayar secara tunai pada saat *right issue* nanti. Sementara *right issue* seperti kami sampaikan tadi, nantinya akan ada keterbukaan informasi yang akan kami sampaikan segera setelah ada konsultasi dengan DPR ini, di mana BRI akan melakukan *right issue* diharapkan akan terjadi di triwulan 3.

Right issue ini nanti akan diikuti oleh pemerintah dalam bentuk penyetoran seluruh Saham Seri B Pegadaian PNM dan ini telah disetujui dengan Kementerian Koperasi tadi. harapannya konsultasi dengan Komisi VI dan Komisi XI bisa kami lalui hari ini dan kemudian pemerintah akan menyetorkan dalam bentuk, penyetoran modal non-tunai, bukan dalam bentuk penyetoran modal tunai, dan tetap mempertahankan satu lembar Saham Dwiwarna di Pegadaian dan PNM sehingga secara kontrol pemerintah masih

mempunyai kontrol atas Pegadaian dan PNM langsung melalui Saham Dwiwarna yang ada di situ. Dan terakhir seperti yang saya sampaikan tadi bahwa transaksi dilakukan dengan menggunakan penilaian independen, KCBP yang mempertimbangkan nilai wajar, *fair value* nilai saham Pegadaian PNM sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, sebagai *recap* dari seluruh paparan kami, kami punya komitmen, satu adalah memberikan layanan produk yang lengkap dengan potensi pendanaan lebih murah bagi 29 juta bagi usaha UMi di tahun 2024. Yang kedua modal bisnis entitas serta budaya dan peran Pegadaian dan PNM tetap dipertahankan, tidak ada perubahan. Yang ketiga ekosistem ini tidak akan menyebabkan pemutusan atau pengurangan hubungan kerja di Pegadaian dan PNM. Yang keempat sinergi *co-location* akan kami percepat sehingga memperluas *coverage* Pegadaian dan PNM.

Yang kelima dampak dari sinergi juga kami teruskan kepada nasabah, sebagai contoh adalah penurunan bunga, sebagaimana disampaikan Pak Arief tadi kepada nasabah akhir, sebagai contoh di Mekaar. Yang keenam, Pemerintah RI masih memiliki kendali langsung terhadap Pegadaian dan PNM melalui satu lembar Saham Seri A Dwiwarna, sehingga status Pegadaian PNM tetap sebagai BUMN, berbeda dengan perusahaan anak BRI lainnya. Yang ketujuh, akan dibentuk komite eksekutif, eksekutif ekosistem UMi yang akan memantau pencapaian seluruh KPI ya kan dijanjikan dalam program pemberdayaan maupun dalam program integrasi ini. Dan terakhir BRI banyak akan menjadi *standby* untuk memenuhi kebutuhan pemodal Pegadaian dan PNM apabila diperlukan penambahan pemodal Pegadaian dan PNM di masa yang akan datang.

Demikian Bapak, Ibu paparan dari kami.

Terima kasih.

Mohon tanggapan dan arahnya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Saudara Menteri yang telah menyampaikan penjelasannya. Yang intinya UMi ini merupakan satu dukungan pemerintah kepada UMKM, yang mana UMKM ini diharapkan akan mampu bangkit atau lebih bangkit dari keterpurukan terutama kondisi sekarang ini adalah akibat dari pandemi Covid-19. Kenapa harus bangkit karena memang UMKM termasuk UMi di dalamnya adalah merupakan jumlah yang cukup besar sekitar 64 juta usaha. Dan hal yang perlu diberdayakan lagi adalah pelaku usaha kecil menengah mikro ini merupakan satu pendukung dari produk domestik bruto secara nasional di Indonesia. Namun satu hal yang kita tadi melihat paparan yang ada ada satu optimisan, ada suatu harapan besar bagaimana meningkatkan segmen untuk ekosistem UMi ini yang kaitan dalam konteks memajukan Indonesia ke depan.

Namun hal yang perlu diperhatikan Pak Menteri dan seluruh jajaran BUMN, sektor UMKM ini baru memberikan kontribusi 14% terhadap ekspor kita. Saya kira ini juga nanti akan terus saling keterkaitan antara persoalan

keuangan dengan kualitas produk, juga strategi pasar UMKM untuk tidak mudah menembus pasar global.

Ada beberapa catatan untuk pendalaman, 8 (delapan) yang fisik, virtual ada 3 (tiga). Untuk yang pertama kami persilakan Pak Herman Khaeron, mohon izin untuk tertib waktu, 3 menit pertama.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang terhormat.

Pak Menteri, Wamen, para Deputi, staf khusus.

Para direksi dari 3 BUMN yang saya hormati.

Pertama saya masih belum bisa memahami secara detail sebetulnya persoalan membangun ekosistem ini, karena kalau tadi dikatakan ini bukan merger tetapi ekosistem terus relasi untuk membangun sinergitas antar pegawainya seperti apa. Misalkan tadi kalau disampaikan bahwa membangun ekosistem ini akan menurunkan *cost of fund*, berapa besar saya kira ini yang harus dijelaskan secara detail, berapa besar penurunan ini dan siapa yang akan menjadi yang diuntungkan ataupun yang memberikan keuntungan. Karena kalau harapannya bahwa permodalan ini selain dari pemerintah dan kemudian dari dana publik, tentu seberapa besar nilai yang akan menjadi keuntungan dari *cost of fund* itu. Ini yang yang menurut saya coba keluarkan angkanya gitu ya supaya supaya jelas Pak Wamen.

Yang kedua, kalau tadi kemudian ada penggunaan infrastruktur yang bersama-sama, misalkan untuk *outlet* dan lain sebagainya tadi menggunakan yang dimiliki oleh BRI dan kemudian ada beberapa BRILink yang juga akan sama-sama menjadi pegawai termasuk saya kira yang terbesar kan di PNM. Di PNM itu kan besar sekali pegawainya dan sistem yang mereka lakukan dan pendekatannya berbeda dengan pendekatan yang dilakukan diperbankan misalkan dengan BRI. Nah kalau kemudian bahwa di situ akan ada penggabungan karena membangun ekosistem yang sama meskipun nanti dibedakan atas kelas yang tentu akan menjadi segmen masing-masing, tetapi apakah ini akan ada pengurangan tenaga kerja atau tidak. Nah kalau ada pengurangan tenaga kerja seberapa besar pengurangan itu akan terjadi, tolong dikeluarkan secara angka.

Kemudian efisiensi terhadap *overhead cost* kalau tadi membangun bahwasanya perbankan mengikuti perbankan, kemudian lembaga keuangan mengikuti lembaga keuangan. Artinya Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani tetap menggunakan aturannya masing-masing, terus pengintegrasian terhadap sistem itu seperti apa, yang menurut saya juga harus dibuatkan bagan seperti apa sih bagannya itu yang kemudian menunjukkan sinergitas ini dengan berbagai aturannya, tidak berbenturan, dan kemudian ini menjadi sinergitas yang baik.

Selanjutnya saya juga berpikir apakah persoalan ini muncul karena memang ada persoalan di masing-masing lembaga keuangan ini atau memang ini adalah ide dan gagasan dari manajemen baru yang dipimpin oleh

Pak Erick. Dulu kan bersama-sama tetap saja BRI juga menyumbang keuntungan, Pegadaian juga menyumbang deviden, kemudian PNM juga menyumbangkan deviden, nah apakah ini penggabungan ini semata-mata karena memang urusan terdampak Covid atau memang karena ini semata-mata ingin meningkatkan kinerja dari masing-masing BUMN ini.

Selanjutnya kalau melihat dari perbandingan angka-angka setelah kemudian dilakukannya proyeksi konsolidasi keuangan ekosistem UMi ini, selalu saja bahwa negara yang menurut saya tidak mendapatkan untung besar. Misalkan tanpa ekosistem laba sebelum pajak itu 74,5 triliun dengan ekosistem naik menjadi 8,29 triliun, tetapi kenaikan terhadap devidennya hanya 1 triliun. Jadi buat apa kalau kemudian penggabungan ini memperbesar terhadap pendapatan, tapi terhadap sumbangan negaranya juga masih kecil.

Yang terakhir agak menyimpang Pak Bimo. Ini mungkin butuh juga penjelasan kepada publik terkait dengan cepatnya pergantian-pergantian itu yang terjadi di Direksi BUMN. Ini penting karena banyak sekali wartawan ataupun media bertanya kepada saya, yang saya tidak bisa menjelaskan karena semestinya ditanya Pak Erick, bukan saya gitu. Apa yang terjadi misalkan baru 5 bulan atau baru 6 bulan sudah terjadi pergantian direksi, berarti *fit and proper*-nya tidak efektif tidak *cespleng* gitu ya sehingga kemudian dalam durasi waktu tertentu yang sangat singkat mereka diganti kembali. Padahal juga kita ingin mendapatkan perbaikan kinerja dari masing-masing BUMN. Kalau pergantian itu sangat cepat terus apa yang mereka bisa kerjakan. Saya kira saya menyambung lidah saja Pak Erick daripada saya bingung menjawab lebih baik Pak Erick menjawab di sini sehingga menjawab semua pertanyaan dari media tersebut.

Saya kira demikian Pak Aria Bima.

Terima kasih mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya sayap kiri kami persilakan Pak Darmadi Durianto, eh enggak ada, Mbak Evita Nursanty.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan.

Bapak Menteri.

Para Dirut.

Dan semua jajaran yang saya hormati.

Terima kasih atas penjelasan yang diberikan walaupun sebenarnya ini sudah banyak kita diskusikan di beberapa kesempatan sebelumnya.

Argumentasi menurut saya kerangka pemikiran yang disampaikan untuk saya pribadi *acceptable* gitu ya kan. Tapi yang penting adalah pembuktiannya Pak Menteri ke depan, apakah benar-benar apa yang disampaikan Pak Menteri, apa yang dijelaskan hari ini dan sebelumnya itu *cost of fund, efficiency expenditure* dan lain-lain, jaringan segala macam itu memang terbukti, karena di paparan yang diberikan ini, *figure* ke depannya hanya diberikan tahun 2024, di mana pemerintahan itu sudah berakhir.

Jadi yang sekarang Bapak-bapak nanti diganti berhasil nggak berhasil ya nggak punya tanggung jawab gitu loh, karena pemerintahannya 2024 sudah berakhir. Nah sekarang ini evaluasi tahunannya seperti apa? Nah itu yang kita ingin tahu Pak Menteri, jadi tidak hanya *figure* 2024 nanti ke depan seperti ini. Jadi sistem-sistem evaluasi, karena saya lihat *statement* dari Menteri Keuangan sepertinya sudah banyak yang menyepakati ya kan, program apa kebijakan ini, hanya yang diperlukan Pak Menteri sekarang adalah persetujuan DPR sesuai undang-undang teman-teman harus mendapatkan persetujuan DPR itu yang diminta oleh Pak Menteri ya kan, kita dari argumentasinya saya pribadi setuju, tapi ada beberapa hal catatan saya nih Pak Menteri.

Yang pertama, ini kan tadi memang masing-masing, dengan entitasnya masing-masing, model bisnisnya masing-masing, tetapi kita bicara ini *right issues*-nya, *right issues*-nya diambil BRI nih, saham Seri B, Pemerintah itu pindah ke BRI semua yang dari dua dua entitas ini, dari Pegadaian dan PNM ya kan yang tinggal Saham Seri A di mereka gitu. Nah tentunya bagaimana pun ini harus ada standarisasi dari SDM. Saya sering mengingatkan ini kepada Pak Menteri dan lain-lain ketika bertemu.

Sekarang contohnya saya yakin kalau kualitas SDM dari BRI itu bagus, saya boleh katakan, bagaimana dengan kualitas SDM di Pegadaian dan di PNM. Nah ini yang juga musti ada standarisasi SDM Pak, holdingisasi yang Bapak lakukan, klusterisasi yang Bapak lakukan, standarisasi dari kualitas SDM ini harus dibentuk sistemnya Pak Menteri, kemudian ya ada *regular performance* KPI-nya itu loh Pak. Itu harus, harus diawasi terus, itu ininya saya.

Kemudian tadi Pak Tiko mengatakan bahwa menjamin tidak ada pengaruh terhadap kepegawaian, tidak ada pengurangan, tidak ada PHK, hal ini justru *benefit* kepada karyawan. Tadi disampaikan nih Pak Tiko ini saya catat yang Bapak sampaikan. Menurut saya ini semuanya harus legalitasnya secara formal.

Jadi yang Bapak katakan tidak ada PHK itu komitmen itu harus legal formal Pak. Jadi jangan hanya disebut sebut saja, sehingga *security* daripada *securence* daripada pegawai daripada Pegadaian, pegawai dari PNM, dari BRI ini mereka punya, demo-demo itu tidak akan terjadi, ketika memang ada komitmen tertulis, tidak ada PKH PHK, tidak ada pengurangan, re-alokasi dari jabatan penting. Tadi kan kita bicara standarisasi kalau orang itu sekarang dia manajer direksi tapi standarnya kecil ya dipindah ke tempat lain, tapi tidak diberhentikan kan begitu Pak, jadi itu sesuai komitmen yang ada. Nah ini penting menurut saya soalnya saya kan baca nih apa namanya struktur organisasi dari kepegawaian, Pegadaian, struktur organisasi struktur organisasi dari PNM. Wah PNM ini luar biasa Pak, satu direktur bisa pegang

kekuasaan yang saya rasa Dirutnya kalah, Direktur Keuangan, Direktur Pengadaan, Direktur Investasi.

Satu direktur yang pegang di PNM ini, luar biasa Pak, Dirut kalah kekuasaannya Pak Dirut dengan satu direktur ini Pak. Ini gimana SDM dia, pengadaan dia ya kan, keuangan dia, enggak benerlah gimana kita mau ke depan melihat ini prospeknya lebih bagus ke depan, bagaimana kita menggabung ini 3 perusahaan tapi berbeda-beda. Mungkin juga Dirut PNM juga di ini kan saya lihat saya baca ini saya kaget juga Pak wah ini lebih dari Dirut *power*-nya ya kan, semuanya dia pegang gitu, terus Direktur Investasi juga, kan dia juga kan Pak ya, keuangan juga ya kan Pak Dirut, saya enggak ngarang kan, saya ngarang enggak Pak? Ah benerkan makanya saya enggak ngarang.

Kemudian tentunya seperti yang disampaikan bahwa tujuan dari pembentukan apa namanya kebijakan yang dilakukan ini memberi kemudahan bagi si mikro, iya dong. Nah sekarang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Herman Khaeron tadi, kita belum lihat gambarannya nih *cost of fund* biasanya Pegadaian PNM ngambil apa namanya pasar modal, bunganya tinggi, dari BRI tadi 2 koma sekian, sembilan sekian, bunganya rendah.

Sekarang kita mau tanya yang di-charge ini kepada nasabah ini berapa? Kita juga mau tahu kalkulasi itu, apa memang jangan-jangan nasabahnya tetep yang untung PNM-nya, ya kan dapat kecil bunga, baik dari BRI sebagai modal, kemudian charge ke nasabahnya ini. Nah hal-hal seperti ini kita juga ingin apa namanya secara detail dilakukan dan juga saya senang tadi mendengarnya Pak, bahwa Pak Dirut BRI mengatakan ini tidak merger. *Statement* ini ke publik harus kita apa namanya masifkan, ini tidak merger masing-masing mempunyai entitas bisnis dan model bisnis yang seperti sekarang ini ya kan. Itu yang penting tidak ada pengurangan pegawai, tidak ada. Nah itu yang yang apa namanya dan buktikan bahwa tadikan katanya *cost efficiency*.

Saya maaf Pak ke Pak Ketua agak lama dikit karena kita mau cepat-cepat hal ini sebenarnya kan kebijakan yang harus kita setuju. Kalau kita nggak jelas bagaimana kita setuju nanti seperti Komisi VII Pertamina dan Pertagas, dan ini yang dihujat DPR RI-nya. DPRRI ketok ketok ketok ketok nggak taunya gak gak sepakat yang dihujat kitanya DPR RI, makanya kita pingin jelas, bahwa persetujuan yang kita berikan memang menguntungkan bagi UMKM itu sendiri gitu loh ya kan.

KETUA RAPAT:

Dipercepat aja Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Kemudian kemudian kebijakan satu atap. Tadi Pak Tiko mengatakan ya kan Pak ya. Ini membuka apa *cost efficiency* karena satu atap, nanti BRI di kabupaten di ini itu ada staf pegawai di si kepegawaian ada Pegadaian ada PNM di situ, pertanyaan saya yang sudah ada sekarang diapakan Pak.

Pegadaian ini kan sudah punya cabang, PNM juga sudah ada, apakah ini akan nanti direstrukturisasi ya kan Pak ya, yang sudah ada ini ya kan, tidak hanya yang ke depan saja yang sudah ada juga akan dilakukan apa namanya perbaikan-perbaikan, terus ini ada berapa catatan Pak.

KETUA RAPAT:

Nanti bisa putaran kedua Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Oke saya rasa itu saja dulu. persoalannya Ketua dari tadi sudah melirik-lirik saya terus gitu kelamaan gitu.

Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Evita.

Selanjutnya kami persilakan Pak Edi Baskoro.

F-PD (EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Pak Menteri BUMN, Wakil Menteri, dan Para Direktur Utama 3 BUMN yang hadir pada siang hari ini.

Saya sebetulnya belum bisa untuk hadir pada siang hari ini karena ada berapa hal yang harus kita pantau, tapi ketika saya mendengar topik ini adalah terkait dengan rencana holdingisasi dan terkait dengan UKM, saya mencoba untuk menghadiri secara langsung.

Saya ingin menyampaikan sedikit kepada Pak Menteri dan teman-teman Direksi BUMN ini. Menurut laporan Yusuf Ishak Institute yang bertajuk *Covid-19 impact on micro small and medium enterprises and tourism in Indonesia*, mengatakan bahwa pandemi mempengaruhi kondisi keuangan UKM di Indonesia, tercatat 52,4% di antara mereka mengaku tak lagi memiliki uang tunai dan tabungan karena bisnisnya terdampak pandemi. Lanjut dari itu 32,8% UKM Republik Indonesia mengatakan bahwa uang tunai atau dana usahanya akan habis dalam sebulan, sementara itu hanya sekitar 8% lebih yang mengatakan masih memiliki tabungan yang cukup untuk mempertahankan bisnisnya.

Tujuan kita di sini adalah sama bahwa kita ingin memecahkan masalah tanpa masalah seperti *tagline*-nya Pegadaian. Saya enggak tahu ketika nanti ada holdingisasi kira-kira *tagline*-nya seperti apa, memajukan Indonesia dengan inklusivitas ekonomi yang berkelanjutan seperti apa yang sampaikan Pak Menteri tadi, meningkatkan ekonomi nasional juga itu merupakan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah kata lain kita ingin UKM kita naik kelas, tetap eksis, bukan justru sebaliknya UKM kita tidak ada yang beli dan kemudian gulung tikar alias bangkrut. Kita tahu salah satu langkah penting pemulihan perekonomian kita adalah untuk meningkatkan para pelaku usaha ultra mikro kita dalam perluasan akses finansial.

Apalagi saat ini ekonomi kita belum membaik dan banyak usaha baik skala yang besar dan kecil pun mengalami kesulitan, dan itulah buktinya bahwa banyaknya program-program bantuan sosial hari ini yang kita terima dan kita salurkan di hadapan masyarakat untuk UKM kita juga. Ada yang menyatakan bahwa holdingisasi ketiga BUMN ini akan memberikan akses finansial yang berbeda, ini justru berisiko mempersempit akses finansial kepada masyarakat melalui prioritas langkah kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan BRI dan Pegadaian Pegadaian misalnya.

Oleh karena itu, yang ingin saya tanyakan adalah apa langkah penjagaan atau *save guard* yang akan diambil demi menjalankan atau menjalin holdingisasi ini justru tidak mempersempit akses finansial keuangan di tengah krisis, tolong dipastikan itu. Di lain sisi, di kalangan pelaku usaha ultra mikro terdapat keengganan mereka tidak ingin atau enggan, pelaku usaha untuk melakukan pengajuan pinjaman kepada bank, belum sepenuhnya, ini realitas kita, mereka hanya ingin dibantu secara langsung menerima subsidi dari negara, atau ada banyak hal yang justru hanya bersedia menggadaikan aset mereka untuk mendapatkan akses finansial tersebut, mereka tidak ingin terlintas hutang melalui akses perbankan.

Nah untuk itu apa langkah yang akan diambil untuk mengurangi keengganan akses finansial melalui perbankan ini? Kita tidak hanya ingin mendengar hanya sekedar melalui sosialisasi sosialisasi saja, tetapi lebih dari itu kita ingin dengar apa langkah-langkah konkritnya, kenapa? Tadi disampaikan juga oleh Bu Evita, karena kita ketahui juga bahwa Pemerintah telah menghapus hak monopoli Pertamina pada tahun 2001. Mengapa Pemerintah mendukung pembentukan monopoli kepada BRI, PNM, Pegadaian melalui holdingisasi ini?

Point berikutnya adalah saya ingin menegaskan kembali apa sebetulnya jaminan yang diberikan Pemerintah terhadap pegawai, tadi disampaikan juga Pak Herman Khaeron, pejabat-pejabat di PT Pegadaian, PT PNM, dan PT BRI untuk mempertahankan pekerja mereka paska holdingisasi ini, termasuk melakukan ya tentunya harmonisasi budaya, struktur organisasi sampai dengan renumerasi gaji gaji karyawannya.

Terakhir di dalam upaya efisiensi dan *trend business online shop* hari ini, sedikit berita baik terhadap kehidupan perekonomian kita, yang bisa dilakukan secara dekat sekarang bisa dilakukan secara sejauh. Mungkin juga dipikirkan ke depannya sebaiknya ada sinergi juga terhadap BUMN *logistic* dan *digital cash* BUMN yang hari ini terkesan jauh tertinggal dan ini merupakan salah satu langkah dan solusi juga ke depannya untuk kita

meningkatkan apa yang kita inginkan seperti program *keep buying strategy*, gerakan berbelanja, ayo berbelanja, karena kalau kita hanya memperluas basis UMKM pembiayaan akses pembelanjaan saja, pembiayaan finansial saja tetapi tidak dijalankan sosialisasi atau gerakan ayo berbelanja, itu tidak akan juga memperluas pasar dan melakukan harmoni dari perdagangan secara keseluruhan. Tolong diperhatikan Bapak Menteri dan para Direksi BUMN yang akan melakukan holdingisasi ke depannya. Semoga apa yang saya tanyakan dapat dimengerti dan dijawab dengan sebaik-baiknya.

Sekian dari saya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebelah kiri kotak kiri dulu, baru Pak Darmadi.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Pak Ketua yang saya hormati.

Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi dan Pak Wamen 3,

Pak Dirut BRI, Wadirut, Pak Dirut Pegadaian dan PNM.

Jadi saya berterima kasih Pak Menteri yang berniat untuk membuka BUMN Utamico yang bertujuan untuk meningkatkan usaha usaha mikro. Tapi saya setelah melihat kebijakan-kebijakan yang baru diluncurkan oleh Pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan meningkatkan PMN ini Pak, cara penyaluran penyaluran yang dilakukan oleh kementerian terkait yang bersinergi dengan PMN, kemarin kita lihat kan bantuan langsung itu melalui PMN itu kira-kira 1,6 juta ya, yang dari Kementerian Koperasi itu Pak, Bansos itu. Jadi cara penyaluran penyaluran ini kan kita memberi kredit, memberi pinjaman, atau pinjaman kan inikan harus dilihat Pak.

Angka berapa uang yang bisa disalurkan ini yang bisa meningkatkan usaha usaha mikro ini gitu loh. Jadi kan tidak sembarangan uang dua juta lima ratus, dua juta empat ratus, usaha apa yang akan diberi bisa berkembang. Misalnya di sini kalau misalnya di konveksi kalau uang segitu kan mungkin tidak bisa untuk mengembangkan usaha-usaha kecil itu, kan harus ada batasan-batasan yang diberikan oleh PNM, atau kalau Pegadaian ini kan biasanya tidak memberi pinjaman masalah-masalah yang kebutuhan-kebutuhan pokok gitu kan, yang kayak saya dulu kepingin pergi waktu SMP nggak punya duit gadein tape recorder kan gitu Pak. Jadi saya ini pernah menggadaikan waktu SMP itu kalau kita beli bensin nggak bisa ya gadein, nanti waktu dikasih orang tua kita kembaliin. Jadikan saya berharap ini tujuan kita membuat BUMN Mikro ini kan untuk bagaimana usaha-usaha ini bisa

jalan gitu loh. Jangan sampai kita ini memberi tapi manfaatnya itu tidak ada gitu loh.

Jadi saya berharap dengan penggabungan antara BRI, Pegadaian dan PNM ini jangan sampai salah langkah, karena setelah saya diceritain oleh PNM itu saya coba ke kantor-kantor PNM Ulam atau apa, saya datengin Pak di Gresik itu, *tak* coba nanya kejelasan status pegawainya itu kayak apa. Jadi saya berharap sebelum penggabungan secara resmi itu dilaksanakan, ini kan Bapak ini merekrut siapa yang mau bergabung dengan PNM Ulam, tapi itukan bukan karyawan dari PNM-nya gitu loh, kan saya sudah tanya gitu loh, dan di situ tuh yang jaga cuma 1 orang Pak di satu ruko itu yang ada di KIG itu Komplek Industri Gresik itu.

Jadi saya kalau diceritain saya kepengen menelusuri semua gitu jadian jangan sampai nanti ada penggabungan, tapi mengakibatkan biaya *cost* tinggi tapi manfaat buat BUMN mikro ini tidak ada gitu loh. Karena ini kan berhubungan dengan usaha dan meningkatkan daya beli masyarakat dan kehidupan masyarakat supaya usahanya itu bisa berkembang gitu loh. Dan saya berharap ini dengan penggabungan ini harus hati-hatilah, karena resiko kredit yang tanpa jaminan itu nanti dianggap itu pemberian, biasanya begitu.

Jadi saya Pak Dirut PNM minta data untuk kantor di seluruh kabupaten Gresik dan Lamongan, beserta kredit-kredit yang diberikan, Insya Allah nanti saya akan telusuri apakah benar kredit yang diberikan dan angka kredit macetnya itu berapa, Insya Allah saya akan datang. Jadi saya berharap Pak Menteri tujuan yang baik ini jangan sampai mengakibatkan perusahaan yang udah untung ikut tergerus jadi rugi.

Jadi itu aja masukan dari saya. Mudah-mudahan dengan penggabungan dan ini bisa meningkatkan usaha-usaha mikro kecil di kabupaten-kabupaten.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Khilmi.

Selanjutnya kami persilakan Pak Mukhtarudin, nggak enak habis Pak Khilmi, terus Pak Gerindra lagi.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Kecuali ketuanya Pak Herman Khaeron, beda itu.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Oke.

Ketua yang saya hormati dan saya banggakan cintain ini Ketua Pak Aria Bima dan seluruh Anggota Komisi VI.

Pak Menteri dengan seluruh jajaran.

Dirut BRI, Dirut Pegadaian dan Dirut PNM, dan Juga jajaran yang hadir.

Terima kasih.

Tadi paparan dari Pak Menteri, Pak Dirut BRI, PNM dan Pegadaian sudah komprehensif sekali ya dan kita bisa memahami tentang apa maksud daripada integrasi dari untuk menciptakan sebuah ekosistem ultra mikro yang disampaikan. Dan kalau dilihat dari paparan tadi tentu ini sebuah harapan yang besar dan merupakan peluang besar terciptanya sebuah ekosistem ultra mikro yang tentu akan bermanfaat banyak kepada pelaku UKM, UMKM. Nah tinggal bagaimana agar ini implementasinya betul-betul bisa diterapkan seperti apa yang dipaparkan.

Dan tentu kami tetap melakukan pengawasan terhadap implementasi daripada holding ini. Dan ini adalah holding bukan merger ya, bukan merger dan jaminan bahwa tidak terjadi seperti teman-teman katakan pengurangan pegawai. Kemudian soal manajemen di masing-masing sub holding, sehingga ini betul-betul memberi rasa aman dan rasa nyaman dan kepastian bekerja bagi seluruh pegawai yang ada di masing-masing, baik di Pegadaian maupun PNM dan BRI.

Efisiensi saya kira harus kita dorong dalam konteks hari ini. Negara kita masih dalam keadaan pertumbuhan ekonomi masih minus di 2019, dan mudah-mudahan di dalam 2021 sudah pada trend positif paling tidak 1 atau 2 persen, sehingga 4 sampai 5% di akhir tahun tahun 2021. Nah ini masih kerja keras dan perjuangan saya kira di jajaran pemerintah termasuk di Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada di Republik ini, dan hari ini kita juga telah melakukan *refocusing*, relokasi anggaran yang awalnya dulu untuk Covid sekitar, untuk PEN itu 300 triliun, sekarang menjadi 600 triliun dan seluruh Kementerian lembaga juga terkoreksi dan terdampak terhadap relokasi dan *refocusing* ini.

Nah, oleh karena itu, maka pembentukan holding dalam konteks terciptanya ekosistem yang baik ini, prinsip ya, prinsip kami mendukung khususnya saya mendukung untuk untuk diimplementasikan. Dan yang perlu dilakukan saat ini adalah sosialisasinya kepada nasabah, dan sosialisasinya kepada karyawan masing-masing sub holding, karena dulu kan sempat ada keresahan seperti di Pegadaian sempat ada keresahan ya, mungkin juga di PNM dan lain, karena bukan apa, karena sosialisasinya saja yang belum maksimal. Nah sehingga ini penting khususnya bagi nasabah, karena ada kegalauan, jangan-jangan nih bunga yang biasanya Pegadaian sekian jadi naik ya, atau PNM bunganya, ini kan bertanya mereka, apakah ada pengaruh ya, apakah ada bunga terpengaruh, bunga pinjaman dan lain-lain. Ini juga perlu disosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat betul-betul paham dan mengerti, dan sehingga dengan senang hati menyambut ya holdingisasi ataupun sinergitas untuk ekosistem ini.

Nah terkait ini adalah satu, dua BUMN ini adalah murni sahamnya 100% pemerintah, dan sementara BRI adalah 50, 50 sampai 60% itu adalah pemerintah dan sisanya adalah public ini memang yang disampaikan oleh

Bapak adalah *right issue* ya yang harus dilakukan oleh BRI. Ini kan langkah awal yang harus dilakukan adalah *right issue* setelah ini kan atau *right issue* dulu, karena ada tentu ada apa ada saham ini akan di akan dijadikan satu kan gitu ya.

Artinya saham punya PNM, saham punya Pegadaian akan masuk dalam saham BRI, tapi dengan catatan bahwa pemerintah tetap tidak tidak terdelusi dari masuknya apa, artinya non-cash ya. Kita harapkan non-cash ini ya Pak, betul ya Pak ya. Artinya saham PNM dan sahamnya dari Pegadaian kan non-cash masuk ke BRI. Jangan sampai nanti ada APBN lagi nyuntik kesitu kan Pak gitu. Jadi harus non-cash dan jangan sampai nyuntik lagi gitu, dan PNM kedepan tentu setelah ini ya tidak ada lagi dapat PMN kan gitu Pak ya, jadi jangan lagi setiap tahun PNM dapat PMN. Jadi dengan begini kan akan terbantu juga pemerintah bisa untuk sektor lain.

Jadi jangan PNM sudah masuk dalam BRI tapi ternyata tahun depan PNM minta PMN lagi kan gitu ya. Nah sekarang ini kita harapkan ke depan betul-betul membuat sebuah ekosistem dan memberikan manfaat *benefit* yang sebesar-besarnya bagi BRI, bagi PNM, dan bagi Pegadaian, bagi nasabah BRI, bagi nasabah PNM, bagi nasabah Pegadaian dan tentu bagi seluruh dan tentu *ending*-nya adalah bagi negara tentunya.

Saya kira itu saja.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(tidak ada suara)

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pak Menteri, Pak Erick dan jajarannya, Pak Wamen, Pak Tiko, Pak Dirut Pegadaian, Pak Dirut PN Madani.

Ini kan saya menganggap ini kan aksi korporasi Pak, *corporation*, di mana ini mau menciptakan nilai tambah, ada si, dengan sebutannya macam-macam, sinergilah apa gitu kan, sinergi berarti masing-masing unit kalau digabungkan menghasilkan nilai yang lebih besar, nilai tambah yang lebih besar. Tentu kita apresiasi karena ini kan dampaknya ke rakyat, outputnya ke rakyat, tapi sudah banyak disebutkan inklusi keuangan, aksesibilitas, bunga yang turun dan sebagainya. Saya punya beberapa klarifikasi saja, mohon nanti dijawab kalau keburu.

Yang pertama adalah soal *target market*, karena ini akan ada yang tidak cocok ini, tidak sama segmennya, *let's say* misalnya Pegadaian. Saya sudah baca itu Pak, saya udah kasih tahu Pak Kus juga, 90% itu bukan pengusaha mikro, itu rumah tangga kebanyakan, yang sebetulnya kalau dia pinjam duit itu dia masuk maunya itu cepet aja Pak, tanpa prosedur, dateng kasih KTP dapat duit, ya dijamin emasnya. Itu karakteristik *behavior* dari pada itu rumah tangga dan 90% adalah bukan pengusaha mikro.

Tentu ini menimbulkan persoalan juga untuk menjangkaunya, ini di sisi target *market*. Kita lihat juga bahwa waktu *co-location* itu Pak, yang disebut *co-location* itu kan saya dapat datanya ternyata selama 3 bulan tuh Pak Menteri tidak efektif. Selama 3 bulan dicoba itu hanya yang datang transaksi itu hanya 2 Pak Menteri, saya coba baca datanya, hanya 2, sedangkan *cost* menempatkan satu petugas, kalau saya salah tolong dikoreksi, adalah 860 juta, *cost* menempatkan dua tugas ada, dua petugas adalah 1,2 M. Ini tentu bisa diperdebatkan nantinya, tapi hasilnya itu selama 3 bulan *co-location* itu hanya 2 transaksi, rupanya karakteristik *pattern behavior* daripada ibu-ibu rumah tangga itu lain.

Mereka masuk bank itu kalau yang saya di Dapil saya di DKI saja, ibu-ibu itu kalau masuk ke bank aja takut Pak, enggak mau. Sementara Bapak mau menempatkan *co-location* itu ada di Bank BRI, ini kan sesuatu yang harus diperhatikan Pak Kus, masalah *co-location* kan Bapak udah *pilot project* 3 bulan, hasilnya sudah saya baca Pak.

Nah ini penting juga untuk diantisipasi Pak Menteri soal yang kedua adalah *marketing* Pak. Bagaimana petugas BRI bisa menjalankan strateginya menjangkau para nasabah Pegadaian. Misalnya, yang ibu-ibu rumah tangga ini, ini kan kultur yang berbeda Pak, tadi tidak merubah entitas, tapi kalau misal mau sinergi petugas BRI juga kemudian dimanfaatkan untuk melayani segmennya Pegadaian, itu butuh *effort* juga Pak. Nah itu itu satu satu *marketing*, yang kedua soal *target market*.

Soal ketiga soal keuangan. Kita berharap ini bunga bisa turun nih ke nasabah-nasabah Pegadaian maupun PN Madani, tapi biasanya Pak Menteri turun bunga tuh sulit, naik bunga lebih cepat Pak, kan itu sudah jelaskan. Nah ini kan komitmen, saya udah baca komitmennya, gimana nge-*push*-nya supaya cepat, tetapi kalau tanpa sinergi pun Pegadaian bisa dapat bunga murah Pak. Pegadaian peringkatnya sudah A, *triple A*, mau keluarkan obligasi semua bisa, pinjam juga bisa, tanpa sinergi juga bisa, jadi apa nilai tambah di keuangan gitu loh. PNM juga demikian, apalagi kalau dikasih PMN terus, 0% kan Pak. Nah apa nilai tambah adanya sinergi dan non sinergi lebih spesifik Pak Menteri, itu yang mungkin kita perlu dalam lebih detail gitu,

Terus Pak Menteri kira-kira ada nggak Pak Menteri selain output yang disebutkan *unspoken goal*-nya ada nggak Pak. Kalau bisa kasih tahu kita *unspoken goal*-nya, *unspoken objective*-nya itu apa Pak Menteri, apa *dream*-nya Pak Menteri terhadap BRI sebetulnya, biar kita tahu juga, karena pengamat itu banyak juga mengatakan bahwa Pak Menteri nih pingin menjadikan BRI ini masuk ke top Fortune Global karena belum ada satu pun BUMN sampai tahun 2020 kecuali 2019 yang bisa nembus. Pertamina terlempar di 2020, 2019 masuk, 2020 keluar lagi, apa itu *unspoken goal*-nya Pak Menteri atau *dream*-nya Pak Menteri di situ.

Nah, mungkin perlu kasih tahu kami juga Pak, karena dengan demikian sebenarnya BRI ini akan menjadi raksasa yang luar biasa *hebat in top of accept, in top of revenue* dengan penggabungan ini, tapi output yang lain saya setuju semua Pak untuk rakyat semua Pak, bagus Pak, tapi kita perlu detail saja seperti apa gitu loh. Apa harapan Pak Menteri terhadap market-market *cap*-nya BRI, itu *unspoken* nggak Pak. Pak Menteri biar tahu *market cap*-nya BRI 581 triliun, kalah Pak sama BCA Pak, *PR*-nya sama BCA Pak 31

kali Pak, kenapa BRI lebih rendah. Wah ini macam-macam alasannya tapi dari sisi *market cap* yang lain bagus semua Pak, tapi saya harapan saya *market cap* ini bisa naik Pak, *PR*-nya Bapak udah 31 kali, *PR*-nya Mandiri baru 17 loh Pak.

Nah, *goal goal* ini kita harapkan Pak Menteri bisa disampaikan kepada kami, tadi Pak. Kalau nggak bisa terbuka, diam-diam juga nggak apa apa Pak, gitu Pak Menteri. Saya apresiasi pada langkah ini, saya setuju Pak, apresiasi karena itu buat rakyat. Saya berharap ini realisasi kalau udah terjadi bunganya cepat turun buat kredit-kredit yang di Pegadaian, maupun PN Madani, maupun yang di BRI.

Itu saja Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami persilakan Andre Rosiade.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Mas Bimo.

Ada berapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak para Deputi tentu terutama Pak Karo TU ya, yang Allhamdulillah sudah sehat kembali, selamat datang Pak, lalu para Staf Khusus dan juga para Direksi jajaran direksi.

Pertama, tentu pertanyaan-pertanyaan Anggota DPRRI yang kita dengarkan tadi Pak Menteri sebenarnya sudah dijawab dalam rapat-rapat berulang-ulang kali yang kita lakukan, baik di FGD maupun di ruang rapat ini. Penghematan ada 400 miliar saya waktu itu dapat penjelasan resmi dari Pak Kus di dalam ruang rapat ini. Kalau seandainya ini berjalan kantor-kantor Pegadaian itu bisa ada di kantor-kantor BRI yang ada di seluruh desa di Indonesia, itu dihitung itu penghematannya 400 miliar per tahun.

Lalu juga soal bunga *cost of money* kita juga sudah bahas di sini. Saya malah menantang waktu itu *cost of money* yang selama ini PNM jual itu 25% bunganya, itu kalau bisa di atas, di bawah 10% atau minimal 15%, itu pun sudah kita pernah bahas di sini. Jadi intinya sebenarnya ekosistem ultra mikro ini sangat baik dan ini salah satu mungkin terobosan dari Pak Menteri BUMN dan juga Presiden bagaimana UMKM-UMKM ini bisa benar bisa hidup, dan ekonomi ekonomi Indonesia ini bisa bangkit dari krisis. Saya rasa ini rapat konsultasi Mas Bimo bukan rapat persetujuan.

Jadi kita setuju apa ataupun tidak setuju Pak Menteri juga bisa jalan terus, karena ini sekali lagi setahu saya ini rapatnya rapat konsultasi. Jadi intinya kalau bagi saya pribadi ini sangat baik ya, kebijakan yang sangat tepat oleh pemerintah, oleh Kementerian BUMN, dan juga oleh Presiden untuk bagaimana kita bisa membangkitkan ekonomi kita, terutama membunuh

rentenir yang ada di Indonesia. Ini catatan penting, sekali lagi yang perlu di-*highlight* oleh teman-teman semuanya, kebijakan ini menyelamatkan rakyat Indonesia dari praktik rentenir yang mematikan rakyat miskin.

Jadi ini terobosan luar biasa Pak Menteri mungkin Pak Wamen butuh *highlight* itu di media. Kebijakan ini adalah kebijakan perang besar pemerintah terhadap rentenir ya. Kita harus selamatkan rakyat kecil kita yang diperas selama ini oleh rentenir dan inilah cara pemerintah menyelamatkan rakyatnya dari praktik rentenir yang luar biasa menghancurkan ekonomi rakyat kecil, itu pertama.

Yang kedua Pak Menteri ini ijin Pimpinan Mas Bimo yang ganteng di luar di luar konteks ya. Yang kedua Pak Menteri saya ingin Pak Menteri bicara dengan Pak Menteri Perhubungan menyelamatkan Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, yang bayar cicilan bunganya luar biasa, kan bangun bandara termasuk Garuda dan Citilink, segera bicara bagaimana per 1 April ini bandara-bandara kita bisa pakai GeNose ya, produk dalam negeri sehingga bandara bisa kembali penuh.

Lalu juga selain bandara penuh maskapai kita Garuda dan Citilink juga bisa terisi kembali, karena memang sekali lagi tiket sudah mahal lalu ada biaya swab antigen yang mungkin 250 ribuan lebih yang bikin beban masyarakat berat, di kereta api sudah bisa, itu Lion Air kompetitor kita. Nah swab antigen itu memberatkan terus terang oleh penumpang. Nah saya harapkan saya selagi Pak Menteri bicara segera dengan Pak BKS agar ada kebijakan pemerintah melaksanakan mempergunakan GeNose di bandara-bandara kita, bukan hanya di stasiun kereta api, karena kalau di kereta api bisa kenapa di bandara tidak bisa, itu yang kedua.

Yang ketiga Pak Menteri, urusan Dapil Pak Menteri, ijin mas Bimo. Jadi ini penting, ada 2.500 Pak Menteri, pensiunan karyawan Semen Padang yang terdzolimi ya, saya catat ini terdzolimi. Saya sudah sampaikan langsung kepada Dirut Semen Padang, saya sudah sampaikan langsung kepada Dirut Semen Indonesia, tapi sampai sekarang tidak ada pergerakan untuk menyelamatkan hak-hak pensiunan yang jumlahnya itu 2.500 yang mungkin besok mereka sudah bisa meninggal dunia karena usianya sudah tua-tua, tunjangan kesehatan mereka tidak dibayarkan, THT mereka tidak dibayarkan. Alasannya manajemen itu salah investasi dana pensiun ke Bumiputera, itu alasannya, ke Bumiputera.

Tapi kalau kita baca laporan keuangan mereka itu sudah dicadangkan Pak Menteri, setiap tahun mereka mencadangkan, di laporan keuangan tuh, sekitar di Semen Padang tuh 200 miliar lebih untuk membayarkan ini, tapi mereka beralasan tidak mau bayar karena ada surat dari Jamdatun. Dugaan saya ya, surat itu kan Jamdatun bisa keluarkan karena surat pengantar dari mereka ya, surat pengantar dari mereka. Jadi saya minta Pak Menteri ini surat resmi dari pensiunan sudah saya terima ya dari karyawan Semen Padang, pensiunan Semen Padang saya terima, nanti saya serahkan Pak Menteri surat resmi ini sebagai Anggota DPRRI Fraksi Partai Gerindra yang mewakili Sumatera Barat. Saya ingin memperjuangkan nasib mereka, jangan sampai THT dan tunjangan kesehatan mereka terima setelah mereka dikubur Pak Menteri ya, dan saya minta ketegasan Pak Menteri 3 bulan ini selesai. Kalau tidak, ya rekomendasikan direksi yang menghalang-halangi

mempersulit hak, karena mereka sudah membayar, dari karyawan mereka sudah membayar kewajiban itu, copot aja ini ya, karena ini penting. Sekali lagi kita harus menyelamatkan nasib mereka, bukan hanya UMKM yang kita selamatkan, pensiunan-pensiunan yang terima gajinya kecil, lalu mereka karyawan kecil yang untuk berobat saja sulit, tolong dibantu Pak Menteri. Ijin Mas Bimo Mas Bimo saya masih mohon ijin maju ya, serahkan surat ya.

ANGGOTA:

Kamera, kamera siapkan, itu penting itu *(suara tidak jelas)*.

KETUA RAPAT:

Detik com sudah siap belum, detik com.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Kok berita di detiknya udah duluan ya.

ANGGOTA:

Iya dong Pakde. *(suara tidak jelas)*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andre Rosiade.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Terima kasih, Pimpinan.

ini cara kita membela rakyat kita, nggak ada gunanya kita duduk di DPR kalau kita tidak membela pemilih kita.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ANGGOTA:

Hidup Pak Andre.

KETUA RAPAT:

Inherent salah satu cara kita untuk terpilih kembali Pak.

F-PDIP (ANDRE ROSIADE):

Tahu aja Mas Bimo itu.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Calon gubernur.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan langsung ke Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Mas Aria Bima yang kami banggakan.

Rekan-rekan Anggota Komisi VI yang kami banggakan.

Pak Menteri, Pak Semsan, Pak Deputi, Pak Wamen dan Pak Dirut yang kami hormati, dan semua jajaran yang hadir.

Saya *simple* saja Pak Menteri dan rekan-rekan. Kalau kita berbicara teoritis, ini kalau saya pikir bukan holdingisasi ya Pak Menteri, sebetulnya kepada lebih kepada klasterifikasi sebetulnya, nah ini yang harus kita satukan dulu, ini bermacam-macam, ada holdingisasi atau ada apa tadi namanya Pak Andre bilang, sistemisasi dan apa, kalau saya bilang ini ini klasterisasi. Jujur BRI Pak Narso, Pak Kus, Pak Arief, kita sudah tahu perjalanan beliau mulai dari bawah sampai beliau menduduki ini sudah kader-kader yang luar biasa, BRI, Pegadaian, PNM berjalan tanpa klasterisasi ini pun sudah bisa, sistematis dari UMi ini bagus, jelas kami mendukung apalagi berbau berbahasa untuk UMKM dan masyarakat itu jelas ya kan itu pasti.

Alasan bisa menekan dengan suku bunga, seperti tadi disampaikan kan, kalau mau menurunkan suku bunga ini sangat susah, kalau menaikkan paling mudah, itu kan harus jelas bagaimana sistemnya iya kan, ya itu yang kita harapkan dengan klasterisasi, klasterifikasi bagi saya nih, bahasanya ini, ini bener-bener terbukti sesuatu hal yang berbeda selama ini yang bisa lebih menciptakan kebaikan.

Jangan sampai BRI yang sudah menciptakan laba, Pegadaian sudah selama ini tercatat menciptakan laba, PNM yang sudah menciptakan laba, kalau nggak salah sudah hampir 500 M sekian, Pegadaian kalau nggak salah 2 triliun sekian, BRI kalau nggak salah 6 ya 6 sekian triliun, 18 *sorry*, 18 sekian triliun dengan klasterifikasi ini nanti ya jangan sampai Pimpinan, mitra holding apa namanya, dari kemitraan kita ini menjadi terseok-seok. Nah, itu catatan Pak Menteri, ini harus dicek, Pak Wamen harus jadi catatan ini. Jangan dengan klasterifikasi ini mereka menjadi terseok-seok atau menjadi penurunan gitu. Nah baru kita bahas bagaimana kita membentuk sistem UMi ini yang sudah dijelaskan, ini sudah gak perlu dijelaskanlah semua ya, jawabannya sudah jelas. Yang terpenting satu adalah pengawasan, kerja sama pengawasan, ini ini masukan. Kalau saya kalau pertanyaan saya kira sudah ada, semua lengkap di sini jawabannya. Pengawasan dari semua ini, perjalanan klasterifikasi ini, terus terang jujur banyak sektor yang perlu kita turun secara langsung yaitu dengan *self service marketing*, BRI selama ini perbandingannya ya, Pegadaian dan atau, ada

swasta-swasta, *fintech* swasta ya, peminjam pinjaman yang kalau di tempat saya tuh namanya kaya rentenir, bahasanya macam-macam ya, ada Bann Aren Bang apa ada kalau di Jawa itu ya.

Mereka kantornya Pak satu kotak, Pak satu kotak kantornya, tetapi mereka berjalan *self service*-nya itu, *marketing*-nya luar biasa Pak kaya-kaya itu, banyak teman-teman saya menciptakan. Bunganya dia meninjau bunga *rate* bunga, dia tinjau *rate* bunga itu, internasional malah dia bahasannya itu, bukan cuman nasional aja, dia bersaing di situ, buktinya dia maju dia sukses. Seharusnya kita BUMN ini mempunyai sesuatu yang besar kita mau mendapatkan PMN dan segalanya harusnya lebih baik dari mereka, termasuk pengawasan dan ini juga catatan Pimpinan, menjadi catatan buat pemerintah bagaimana mengawasi perusahaan-perusahaan *fintech* atau swasta ini ke depan bila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jangan yang dijadikan korban adalah sistematis dari kemitraan BUMN, yang dijadikan korban.

Nah, BUMN orang memang jujur, masyarakat, apalagi saya tahu sendiri, masyarakat kultur, pondok pesantren dan sekarang yang paling sulit kepercayaannya itu apa, kita ini pulau kemaritiman Pak, kelautan, sampai hari ini Pak nelayan itu susah mau cari pinjaman duit, semua lewat rentenir, ndak sulit dan mereka bayar loh, ndak ada masalah, bayar semuanya. Nah itu yang perlu pengawasan dan sistem *self service* diciptakan diklasterifikasi ini dalam, secara langsung bertemu dengan masyarakat.

Ini yang masih belum, yang masih belum terjangkau sampai hari ini, ke pondok pesantren itu yang terpenting juga, banyak kebutuhan UMKM di sana Pak, tapi sulitnya itu loh aksesnya. Nah, ini BRI, Pegadaian, dan PNM yang sudah selama ini berjalan sudah bagus memang, tapi lebih dimaksimalkan lagi apa lagi dengan klasterifikasi ini secara langsung bisa diterima masyarakat, itu aja sistemnya. Jadi mereka tidak takut masuk ke ruangan ber-AC-nya BRI, ke Pegadaian yang mewah dan lain-lain, tidak takut. Kita ajak mereka, kita rangkul masyarakat kita, ayo nih, ini lho BUMN, inilah negara kita tidak mempersulit, tidak menyakiti, tidak mempersusah kalian, ayo. Nah ini klasterifikasi, ini yang terpenting harus dicatat, itu manfaat yang terpenting. Jangan sampai adanya klasterifikasi ini menjadikan terseok-seok kepada BUMN kita.

Itu aja catatan bagi kita, intinya yang berhubungan, bermanfaat kepada masyarakat apalagi di sini didukung oleh Pak Erick, Pak Wamen yang sudah kredibel, teman-teman semuanya ada Pak Narso, ada Pak Kus, ada Pak Arief yang memang sudah mereka kaderisasinya yang luar biasa kepada masyarakat dan kredibel ya kan, saya kira ini Insya Allah bisa menjadi sukses.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumusalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Mohamad Toha itu tidak ada lho secara fisik.

ANGGOTA:

Keluar.

KETUA RAPAT:

Keluar.

Pak Nusron Wahid.

F-PG (NUSRON WAHID):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Menteri yang kami hormati, Pak Wamen.

Pak Dirut BRI, Dirut PNM yang paling kecil, dan Pak Wadirut BRI, Pak Dirut Pegadaian, dan Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Andre Rosiade.

Saya pingin tanya dulu Pak sebelum saya lebih jauh kepada Pak Menteri. Konsolidasi unit usaha mikro ini, ini kan peristiwa bisnis, bukan peristiwa politik kan Pak ya, murni peristiwa bisnis kan? Kenapa ini saya katakan ini peristiwa bisnis, supaya *public* juga paham sambil saya mendengarkan penjelasan Pak Menteri sama Pak Wamen di sepanjang jalan Antasari tadi, kanan kiri itu banyak spanduk tolak holdingisasi Pegadaian, hanya saja di situ tidak ada fotonya Pak Erick Thohir sama fotonya Pak Tiko, fotonya Pak Narso sama Pak Catur dengan gigi begini kayak dulu jaman sentuh itu dulu gak ada bedanya.

Nah saya memaknai *wong* orang saya ini tukang bikin spaduk, dan tukang spanduk iya kan, ini berarti ada yang salah menerjemahkan, salah menafsirkan Pak Bimo, bahwa seakan-akan peristiwa ini adalah peristiwa politik, bukan peristiwa bisnis. Dan saya setuju memang betul, apa yang disampaikan oleh jawaban Pak Erick bahwa rangkaian kegiatan ini secara filosofis adalah memang peristiwa bisnis murni, bukan peristiwa politik. Beda dengan dulu proses penjualan saham Indosat, ini adalah peristiwa politik karena apa ada entitas saham negara yang keluar dimiliki oleh *public* dalam konteks ini tidak ada entitas saham negara yang dimiliki *public*, yang bergeser dari punya negara menjadi punya public, tidak ada.

Hanya ini adalah hanya pergeseran dari entitas punya negara, dari kantong yang dulunya bernama kantong Pegadaian dan kantong PNM, pindah menjadi kantong namanya kantong BRI, hanya ini kemudian menumbuhkan kapitalisasi, yang secara teknikal bisnis itu sama-sama tadi jelaskan dengan fasih oleh Pak Wamen II, sama Pak Narso ya sudah beruban ini Pak ini Pak Narso ini iya kan, sama Pak Arief Mulyadi sama Pak Pegadaian masing-masing sama-sama *mutual benefit*, sama-sama mempunyai kemanfaatan.

Karena ini adalah filosofinya begitu dan ini adalah peristiwa bisnis, maka pekerjaan Anggota DPR adalah membantu pemerintah, membantu pemerintah untuk menjelaskan sama *public* terutama ini *public* Pegadaian ini, kita ngomong di sini nih *public* Pegadaian ini terutama, karena yang muncul dalam spanduk-spanduk itu *wong* saya tukang bikin spanduk dan tukang pasang spanduk, jelas adalah Pegadaian, pasti ini perkara munculnya dari Pegadaian yang masih menganggap bahwa ini adalah peristiwa politik.

Jadi ini harus dihentikan, kapitalisasi dan politisasi isu ini, dan itulah pentingnya rapat ini Pak Andre, bukan sekedar konsultasi tapi penguatan iya kan, untuk apa, untuk menghentikan isu-isu liar, bahwa ini dianggap ditarik dalam konteks peristiwa politik supaya tidak makin hari makin membesar. Saya tidak pingin fotonya Pak Menteri saya ganteng ini nanti nanti seperti Ibu Sri Mulyani dulu dipasang gambar begitu sambil giginya muncul begitu, kan nggak enak itu, enggak sedap. Saya pernah mengalami digituin Pak masalahnya sama, zaman saya jadi Tim Sukses Ahok begitu dulu, ngalami begitu masalahnya. Nah sama Pak Tiko sama Pak Narso muncul begitu nggak enak nanti bertiga begitu, seakan-akan menjadi orang yang dicari, yang berdosa atas kejadian ini, padahal ini peristiwa bisnis biasa, tidak ada peristiwa politiknya.

Nah saya itu minta Pak Menteri ya kan, Pak Pimpinan sidang, jelas pada rapat siang hari ini harus jelas *statement*-nya secara filosofi ada penegasan bahwa ini adalah peristiwa bisnis bukan peristiwa politik, sehingga jangan ditarik-tarik pada wilayah tarikan politik supaya temen-temen karyawan Pegadaian juga ngerti, paham, bahwa ini peristiwa bisnis, ini kita udah ngomong terang Pak, Pak Dirut Pengadain ya kan, supaya temen-temen yang diajak berkolaborasi oleh temen-temen karyawan Pegadaian juga paham. Mana Pak Amin ini, kalau ada Pak Amin enak ini, Pak Amin PKS, karena Pak Amin PKS kayaknya yang paling komentar paling keras di media masa, terbawa arus politisasi itu, ya kan Pak Amin PKS nggak muncul ini, sayangnya ini, supaya sama-sama *clear* di sini bahwa ini penerjemahannya adalah peristiwa daripada bisnis, *impact*-nya pun kita jaga jangan sampai semuanya *impact* politik.

Nah yang terakhir Pak, Pak Menteri *out of context* juga, Pak Bimo waktu kita kunjungan kerja ke Surabaya, itu Pak Demer sama temen-temen tuh marah-marah itu, minta ada surat resmi, teguran resmi kepada Dirut Semen Indonesia, dan waktu itu kesimpulannya dibuat surat resmi kepada Pak Menneq BUMN. Karena berkali-kali katanya diundang anu kunjungan kerja Komisi VI itu nggak pernah datang, Dirut Semen Indonesia. Suratnya sudah dikirimkan belum? Mumpung ada Pak Menteri ini, ini keputusan waktu Kunker di Surabaya. Jangan sampai lupa, jangan sampai nanti yang mimpin Pak Faisol Riza masalahnya, jangan sampai nanti pimpinan juga lupa ngirim surat itu, mumpung ada Pak Menteri.

Tolong tuh Pak sebelum suratnya diluncurkan, jangan sampai ada upaya hubungan kelembagaan yang tidak baik, hubungan, saya ini di DPR sudah 20 tahun, hubungan kelembagaan kementerian yang paling baik saya alami itu adalah Kementerian BUMN hari, dengan DPR hubungan kelembagaannya. Ya kan saya enggak pernah mengalaminya sebaik ini selama saya jadi anggota DPR, gak atau ini berkat Pak Erick

Thohir, atau berkat Pak Arya Sinulingga, saya nggak tau ini, saya nggak tau ini. Ya kan, tapi kalau saya sih karena juga kan berkat tim *building* yang dibangun oleh Pak Erick Thohir Pak, sama-sama menghargai. Tapi jangan sampai ada juga salah satu instrumen yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir pun tidak menipu akhlak yang dibangun oleh Pak Erick Thohir, ini masalah akhlak ini.

Saya kira itu, Pak Bimo.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumussalam.

Sebelum saya masuk ke yang di virtual ada Pak La Tinro, ada Pak Sonny, ada Pak Amin, ada Pak Nyat Kadir.

Pak Menteri, saya minta Biro Hukum, saya juga memerintahkan ke staf ahli, karena terkait dengan keputusan rapat kita ini. Tadi ada yang menganggap persepsi bahwa rapat ini cukup memberikan dukungan, ada yang penguatan, bahkan ada yang bertujuan, supaya kita kaji bangunan hukumnya seperti apa untuk hubungan dengan terkait dengan rencana ekosistem ultra mikro ini. Tetapi satu pihak di sini ada Komite Privatisasi menyetujui program (***suara tidak jelas***) untuk pembentukan ekosistem BUMN ultra mikro melalui *right issue* BRI. Mengenai *right issue* ini ada bangunan hukum untuk persetujuan DPR, tetapi untuk ekosistem ultra mikro itu memang itu domain dari aksi korporasi masing-masing korporasi dengan kementerian. Tetapi *right issue* ini pun juga lepas saham, ini juga hanya keuangan yang di dalam ekosistem. Ini mohon di kajiannya supaya didalami, posisi bangunan hukum untuk ekosistem ini. Saya kira itu, ini.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Pimpinan, Pak Bimo. Saya sebentar saja.

KETUA RAPAT:

Bentar dulu, saya serahkan, kita masuk lagi ke pendalaman. Sebelum ke kawan-kawan yang ada di virtual.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Terima kasih.

Jajaran Pimpinan, serta rekan-rekan Anggota Komisi VI yang saya banggakan.

Pak Menteri beserta segenap jajaran beserta jajaran direksi ada BRI, Pegadaian, dan PNM.

BUMN selaku penggerak utama perekonomian negeri ini dalam setiap melakukan aksi korporasinya, indikator yang saya lihat adalah jika *trend* rupiah itu menguat, dan alhamdulillah isu holdingisasi ultra mikro hari ini itu *trend* rupiah menguat. Berarti apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN itu direpson positif oleh pasar, jadi kami setuju setuju saja dengan aksi korporasi hari ini.

Terima kasih Pimpinan

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilahkan kepada kawan-kawan yang di virtual Pak La Tinro, Pak Sony.

F-P. GERINDRA (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Supratman, Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Amin, Pak Nyat Kadir, Pak Supratman ya kami persilakan dulu Pak La Tinro, Pak Supratman tunggu dulu ya, karena baru masuk.

F-P. GERINDRA (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Pak La Tinro.

Bisa enggak itu Pak La Tinro, itu ada itu.

F-P. GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Ya, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Pimpinan, dan yang saya hormati serta seluruh Anggota Komisi VI saya hormati.

Pak Menteri bersama Wamen, dan Para Dirut yang sempat hadir yang saya hormati.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tadi sudah banyak teman-teman juga mempertanyakan. Saya cuma satu aja Pak Ketua, Pak Menteri, karena mengenai rencana-rencana akan dilakukan. Saya kan berpikir, saya berpikir bahwa tentu sudah melalui pengkajian yang akurat, tentu sudah ada naskah akademik yang dibuat para ahli dan lain-lain dan lain-lain.

Artinya mudah-mudahan holding ini bisa baik dan disetujui, dan mudah-mudahan juga pada akhirnya problem ini bisa terus berlanjut, karena jangan sampai pada perubahan menteri yang berikutnya terjadi lagi perubahan-perubahan yang kita tidak inginkan. Karena kalau melihat selama ini pengalaman-pengalaman yang ada bahwa izin-izin aja, izin-izin misalnya yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian pada saat pergantian pimpinan terjadi perubahan-perubahan aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu, sebagai contoh saja ada izin karena aturan itu selalu berubah, berubah-berubah karena kepemimpinan yang berubah, berubah juga, ada izin sampai 13 tahun pun belum selesai sampai sekarang. Nah ini harapkan bahwa holding ini bisa tetap bertahan dan bisa terus bermanfaat pada tahun-tahun selanjutnya, walaupun ada pengganti menteri.

Satu aja yang saya ingin ditanyakan Pak Menteri, mengenai saham khususnya saham-saham nilai saham minoritas yang juga tentu dilindungi oleh undang-undang, tentu juga nanti melalui RPUS. Apakah ini sudah ada perhitungan-perhitungan? Sudah ada rencana-rencana untuk itu? Karena misalnya saya pengalaman dulu misalnya Bank Danamon, dari saham-saham yang ada minoritas itu dari 3 ribu akhirnya menjadi 7 ribu dan semua disetujui oleh saham-saham yang minoritas. Apa ini juga sudah ada perhitungan-perhitungan untuk itu atau rencana-rencana untuk itu?

Di luar daripada konteks ini Pak Menteri, di luar daripada konteks ini, minta maaf Pak Ketua dan Pak Menteri mumpung bertemu dengan Pak Menteri, kita lihat bahwa BUMN sekarang ini adanya banyak yang rugi, korupsi, dan lain-lain. Tentunya harapan-harapan kita ke depan tidak terjadi hal yang demikian dan ini juga saya sering berpikir kok bisa terjadi korupsi. Padahal kalau dilihat para direktur-direktur yang memimpin BUMN itu adalah orang-orang yang punya kapasitas yang baik tetapi kenapa bisa terjadi. Harapan-harapan ke depan mudah-mudahan sistem pengawasan, kontrol, evaluasi, dan monitoring ini bisa terjaga dengan baik.

Sekian Pimpinan, cuma itu.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Sonny sebelum Pak Supratman.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati yang terhormat Pimpinan beserta segenap Anggota Komisi VI, dan

Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran dan para Dirut.

Pertama saya sungguh mengapresiasi pada Pak Menteri dan jajaran yang tetap semangat dan berani untuk terus melakukan pembenahan terhadap BUMN, tetapi khusus keberanian yang tidak pernah menyerahkan *roadmap* saya tidak apresiasi Pak.

Yang kedua saya mengapresiasi juga kelincahan dan keluwesan Pak Menteri, meskipun ini kelihatan sederhana tapi penggunaan misalkan istilah UKM naik kelas itu sudah mulai meruntuhkan sekat-sekat ego sektoral antar kementerian dan lembaga. Orang banyak tahu bahwa kalau bicara soal UKM naik kelas itu punya Menteri Koperasi, tapi Menteri BUMN Kementerian BUMN terbiasa menggunakan itu. Demikian juga sebaliknya pada UMKM juga banyak diakses oleh atau disampaikan oleh teman-teman Kementerian Koperasi dan UMKM. Semoga keluwesan-keluwesan semacam ini semakin menghilangkan ego sektor kementerian lembaga yang selama ini terjadi.

Yang kedua, agenda rapat kali ini adalah pembentukan Holding Ultra Mikro. Nah saya ingin mengomentari dan menanyakan dalam perspektif yuridis normatifnya, karena dari beberapa anggota tadi kecuali kayaknya Bung Andrea saja, semuanya agak masih bimbang belum cukup paham apa yang kita bicarakan pada hari ini, termasuk apakah ini nanti kita memberikan persetujuan, konsultasi dan sebagainya, meskipun menurut saya hal semacam ini, aksi korporasi ini adalah domain dari Kementerian BUMN. Nah, terkait dengan saya ingin mengomentari atau menanyakan dalam perspektif yuridis normatifnya adalah, dari paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Wamen serta para dirut-dirut tadi, meskipun agendanya adalah pembentukan Holding Ultra Mikro tapi semuanya tidak ada yang bicara soal holding.

Pak Menteri menggunakan bahasa tadi membangun ekosistem, Pak Wamen menyebutnya dengan integrasi, kemudian tadi Pak beberapa direktur juga menyampaikan soal apa namanya ini soal komunitas soal ekosistem ultra mikro. Nah, apa yang disampaikan semuanya itu tadi kalau kita melihat Undang-Undang BUMN tidak ada nomenklatur semacam itu.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang BUMN hanya menyebutkan soal restrukturisasi dan privatisasi, atau kalau dalam Bab 5 yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, yang dibicarakan soal holdingisasi antara BRI, Pegadaian, dan PNM ini masuk kategori yang mana, karena ini tentu masing-masing akan membawa konsekuensi hukum masing-masing. Sama dengan ketika ini holding ikut dalam BRI misalkan, ya tentu BRI sebagai PT terbuka, perusahaan terbuka punya atau harus mengikuti hukum privat, hukum publik yang lain.

Nah, saya butuh kepastian soal itu, tapi kalau tadi disampaikan tidak ada satu pun yang berubah berarti ya tidak ada yang perlu kita bicarakan di

sini. Andaikan kalau ada yang berubah misalkan tadi udah banyak bicarakan salah satunya ini adalah untuk pengembangan usaha mikro, apakah nanti kemudahan yang didapat oleh para nasabah Pegadaian khususnya itu akan terjadi. Kalau tadi *problem*-nya adalah kita ingin melawan para rentenir, Pegadaianlah yang paling cukup mampu melakukan itu. Orang hanya cukup bawa kain batik, bawa kerudung, bawa *sewek*, bawa emas, dan datang ke Pegadaian, pulang pasti akan bawa duit. Kecepatan-kecepatan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, jadi saya ingin mengkonfirmasi itu kemungkinannya seperti apa, terus terang saya saya masih bingung.

Yang kedua Pak Menteri yang saya hormati, apapun Pak Menteri adalah pembantu Presiden dan saat ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, PP ini dibentuk dimandatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja khususnya Pasal 86, 87, 88, 89 dan seterusnya. Sebagai pembantu Presiden tentu Pak Menteri memprioritaskan Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Pak Jokowi ini. Nah, saya ingin menanyakan sejauh mana kesiapan dari Kementerian BUMN dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut.

Dalam Pasal 60 misalkan, kementerian lembaga dalam hal ini BUMN punya kewajiban menyediakan 30% total luas areanya untuk tempat usaha promosi bagi pelaku UMKM atau Pasal 29 129-nya, bahwa BUMN menyediakan pembiayaan dan usaha mikro. Maksud saya adalah kalau maksud tujuan adalah soal pemberdayaan UMKM saya kira dengan melaksanakan PP Nomor 7 Tahun 2021 ini sangat cukup, atau mungkin saya tidak tahu ada agenda seperti apa yang lain.

Tadi kalau Kyai Nusron sebutkan ini tetep bukan peristiwa politik, saya mengikuti saja tapi saya kira perlu ada kesamaan frekuensi sebetulnya 3 BUMN ini mau dikemanakan sih modelnya. Jadi saya kira ini yang butuh kejelasan karena kami tidak ingin Pak banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN itu kami mengetahuinya setelah dari media, sementara kami adalah mitra. Di internal kami sering sering resah, kenapa lebih banyak bicara ke wartawan daripada ke kami, apalagi kami tidak punya *roadmap*. Jangan sampai ada kemudian muncul sakwasangka di antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN yang menurut teman-teman anggota tadi adalah ini adalah hubungan terbaik selama ini. Jangan sampai ada sakwasangka bahwa holdingisasi ini sejatinya adalah untuk mengurangi objek pengawasan dari DPR. Ketika semua anak perusahaan, semua BUMN jadi anak perusahaan, kita akan kehabisan objek untuk melakukan pengawasan, kita tidak bisa detail melakukan itu.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami persilakan Pak Supratman.

F-PKS (AMIN AK, M.M):

Amin Pak Bima

F-P. GERINDRA (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.) :

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Amin

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Daftar Ketua ya.

F-P. GERINDRA (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Pak Wamen dan Dirut BRI, Pegadaian dan Permodalan Masyarakat Madani yang saya hormati.

Prinsipnya, prinsipnya, kami tentu memberi dukungan, kami tentu memberi dukungan terhadap semua program yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN. Tadi menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak La Tinro dan kawan-kawan, Pak Darmadi juga, saya berprinsip dan mungkin ingin menyampaikan sesuatu hal.

Yang pertama adalah kalau kita bicara soal inklusi keuangan yang tadi sudah dipaparkan saat ini hanya kurang lebih sekitar 70% dan targetnya menjadi 90%. Mungkin ada baiknya juga lembaga-lembaga katakanlah perbankan di luar BRI umpamanya ataupun juga Pegadaian dan terkhusus kepada Permodalan Madani, mungkin bisa melakukan diversifikasi ya terkait dengan pembiayaan dalam rangka untuk mencapai target inklusi keuangan kita sampai 90%, karena ketiga lembaga apakah itu PNM, kemudian juga Pegadaian, dan perbankan itu kan lebih banyak menyalurkan sifatnya adalah pinjaman.

Nah, saya berharap ke depan terutama kepada permodalan masyarakat madani yang memang dikhususkan dalam rangka melakukan pendampingan kepada UMKM, itu mengembangkan berbagai macam fitur-fitur kelembagaan keuangan yang baru. Katakanlah mungkin apakah itu pun apa sifatnya bisa menjadi *venture capital* ataupun juga mungkin membuat *platform* dalam pengertian ada semacam *equity* ya. *Platform equity crowd funding* yang bisa dilakukan, di mana memungkinkan pernyaratan, apa namanya permodalan madani itu bisa masuk sebagai *shareholder* di dalam unit usaha kecil dan menengah. Kalau kemudian itu bisa dilakukan tentu akan jauh lebih baik, karena tanggung jawabnya tidak sekedar hanya untuk menyalurkan pinjaman tetapi juga bertanggung jawab terhadap pengembangan dunia usaha di sektor, apalagi di sektor ultra mikro ya. Nah,

artinya pemasarannya kemudian juga bantuan dukungan manajemennya bisa dilakukan.

Kalau ini bisa dilakukan maka target untuk meningkatkan kelas UMKM kita itu mungkin bisa tercapai jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Pak Darmadi tadi. Menurut saya itu harus menjadi perhatian kita semua bahwa kalau kita perhatikan di unit Pegadaian yang sebagian besar merupakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Jadi sasaran dalam kerangka untuk penyaluran pinjaman itu tidak tercapai sebagaimana yang kita inginkan karena lebih banyak akhirnya masuk ke dalam sektor konsumsi konsumtif ya bukan dalam rangka pengembangan usaha. Terbukti kita bisa melihat pasti Pegadaian itu penyaluran pinjamannya akan sangat tinggi menjelang Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha di mana ibu-ibu dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi kalau kita bicara soal pengembangan UMKM apalagi ultra mikro khususnya sekali lagi mungkin diversifikasi menyangkut soal pembiayaan-pembiayaan itu bisa dilakukan. Demikian saran buat Menteri BUMN.

Dan yang terakhir Pak, saya hormat dan salut terhadap semua ide dan gagasan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Nah, oleh karena itu, saya menyarankan begini Pak kekhawatiran apa yang disampaikan oleh Pak La Tinro tadi itu penting, bahwa jangan sampai nanti kemudian seluruh regulasi yang dibuat dan kebijakan-kebijakan yang ada pada hari ini kemudian terjadi siklus pemerintahan 5 tahunan itu akan sangat mudah untuk dikonsolidasi kembali dan merubah kebijakan yang baik ini.

Nah, oleh karena itu, saya berharap Kementerian BUMN bersama dengan Komisi VI untuk segera bisa melembagakan seluruh kebijakan-kebijakan apakah itu holding dan lain-lain sebagainya dalam bentuk bagaimana kita menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN sehingga nanti Pak Erick Tohir yang saya percaya bahwa dengan latar belakang sebagai pengusaha, itu bisa memikirkan jalan, jalan apa *roadmap*-nya daripada BUMN kita sehingga tidak setiap kali ada terjadi rotasi pemerintah pergantian pemerintahan juga seluruh kebijakan-kebijakan itu akan berubah. Nah, kecuali hal-hal yang terkait teknis itu bisa saja dilakukan.

Tetapi terkait dengan kebijakan makronya itu harus ada peta jalan kita yang memang kita wujudkan dalam bentuk undang-undang, sehingga saya berharap komunikasi antara Pimpinan Komisi VI dengan Kementerian BUMN buatlah rancangan undang-undang yang bisa memberi justifikasi yang baik dan tidak mudahnya adanya silih berganti terhadap kebijakan-kebijakan hanya karena rotasi pergantian rezim yang memang setiap lima tahunan itu pasti akan terjadi.

Demikian Pak Bima.

Terima kasih Pak Bimo

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Dan selamat siang.

KETUA RAPAT:

Pak Amin. *Mute* Pak Amin, di-*mute* itu.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Ya, makasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Pak Menteri BUMN, Pak Wamen BUMN dan semua jajaran.

Para Direksi 3 BUMN dan semua jajaran yang saya hormati.

Ini ketiga kali saya mengikuti RDP yang terkait dengan tema ini, dua kali secara *offline* dan satu kali secara *online*. Maaf saya sedang menuju dapil untuk jadwal Sosialisasi 4 Pilar, jadi tidak bisa mengikuti secara *online*.

Yang RDP pertama waktu itu saya minta kepada Pak Mas Tiko kalau enggak salah, memang saya biasa manggil mas kalau *wong* Suroboyo, agar peta jalan yang dibuat oleh kementerian dalam hal ini benar-benar berpihak ke rakyat kecil, tapinya kecil semakin mendapatkan akses modal dengan mudah dan semakin murah dan tentu ini akan berdampak pada apa namanya market yang semakin luas bagi 3 BUMN ini. Yang kedua, saya minta jaminan tidak adanya PHK, dan yang ketiga dengan holding ini *performance* masing-masing entitas yang memang selama ini sudah baik harus menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah waktu itu memang sudah dijawab walaupun tentu butuh pembuktian di lapangan nantinya.

Kemudian, kedua, seiring dengan berjalannya proses ini kami mendapatkan masukan-masukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Langsung artinya ada aspirasi, kemudian tidak langsung melalui telepon khususnya tentu dari para karyawan di Pegadaian yang masih apa namanya tidak menerimalah ya, belum menerima, belum *tune*, belum merasa nyaman dengan holding ini gitu loh. Oleh karena itu, kami juga waktu itu sampaikan kepada Mas Tiko ya agar proses sosialisasi ini diintensifkan, dimasifkan, sehingga *roadmap* yang sudah dibuat oleh Kementerian BUMN benar-bener dipahami oleh sebelum masyarakat tentu oleh seluruh jajaran karyawan khususnya di dua BUMN yaitu Pegadaian dan PNM.

Kemudian yang ketiga, ini sebelum acara ini berlangsung beberapa hari yang lalu saya baru baca di media tentang apa namanya *statement* Bu Sri Mulyani yang intinya bahwa pemerintah akan menyerahkan saham Seri B yang dimilikinya di PNM maupun Pegadaian kepada BRI, dan nanti ada untuk holding ini ada proses *right issue* ya. Dan tentu sepengetahuan saya ya saham BRI lebih dari 35% nya itu kan dimiliki oleh swasta asing, mohon maaf nih kalau saya salah ya. Nah dengan *right issue* itu kan juga paling pertama berhak untuk memperoleh saham itu dan proses holdingisasi yang diikuti dengan akuisisi dengan *right issue* ini kan, ini namanya holding yang rasa apa, berasa *merger* ini menurut saya. Ini mohon maaf juga kalau salah, tolong diluruskan, ini berbeda dengan holding-holding yang dilakukan di perusahaan perusahaan di sektor usaha yang lain gitu loh. Nah, dalam hal ini tentu kami ini tidak anti, dan tidak tidak ingin membawanya ini ke ranah politik

seperti yang dikatakan oleh Gus Nusron ini, kami murni bicara ini dari ranah bisnis, apakah apa namanya swasta, bahkan asing yang mereka tentu perusahaan-perusahaan yang sudah besar, ya sudah kuat, bergerak di bidang bisnisnya akan masuk ke lini-lini bisnis mikro seperti ini gitu loh, ya itu yang pertama. Artinya kita akan merelakan walaupun tentu dari sisi ekonomi ya nggak ada masalah lalu apa iya asing akan menguasai sektor ini ya, memang selama ini nggak sampai 40%, tapi siapa yang menjamin pada akhirnya juga nanti ada penjualan saham lagi dari holding ini ya, atau saya bilang holding rasa merger ini pada sewaktu-waktu sehingga kepemilikan swasta dan juga swasta asing ini semakin besar, dan tentu ini akan mengurangi kontrol pemerintah atau kontrol kita DPR ya kepada perusahaan ini, itu yang saya kritisi.

Kemudian, yang berikutnya, selama ini ketika kita bicara apa namanya bisnis gadai, referensi kita tuh jelas, ya Pegadaian yang punya slogan menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu, walaupun ya *cost of fund*-nya secara umum masih tinggi, tapi masyarakat merasakan kemudahan dalam mendapatkan akses modal, praktis, bagaimana dikatakan oleh Pak Darmadi tadi gitu.

Nah, kemudian sumbangsih devidennya kepada pemerintah. Apalagi kalau dikaitkan dengan nilai asetnya menurut saya Pegadaian itu termasuk salah satu BUMN yang terbaik, kalau dibanding dengan jumlah asetnya ya. Nah, ini tentu apakah sudah nanti menjamin setelah proses holding ini ciri khas ini kita hilang. Kemudian usaha gadai ini juga semakin tumbuh dan juga masih bisa menjadi referensi masyarakat, mungkin bahkan dunia ikut gadai ini ya, usaha gadai yang menguntungkan dan sangat bagus *performance*-nya.

Saya kira itu saja ya Pak yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang tertangkap kurang tertangkap dengan jelas karena dalam perjalanan ke dapil, Demikian Pimpinan yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Nyat Kadir.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Baik, Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI.

Bapak Ibu Anggota DPRRI Komisi VI.

Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri.

Mungkin ada Staf Khusus Pak Arya Sinulingga, Pak Dirut PNM maupun Pegadaian.

Dalam prinsipnya kami mendukung, inilah, kami mendukung ini, Nasdem, mendukung kebijakan ini, memang tujuannya mulia, memajukan Indonesia dengan memperluas jangkauan, memperdalam layanan dan pemberdayaan masyarakat secara utama UMi dalam berkelanjutan. Jika di sini tidak diragukanlah cuma nanti implementasinya tetap menurut kami harus hati-hati. Namun, tadi saya sudah baca juga nanti dibentuk komite pemantauan, ya akan dibentuk komite pemantauan untuk memantau apakah ekosistem ini berjalan sebagai sebagaimana mestinya.

Nah, beberapa catatan saya, ingin saya tanyakan juga kepada Pegadaian, Dirut Perusahaan Pegadaian. Kemarin saya baca di *online*, persatuan buruh di pegadaian itu demo menolak, menolak integrasi atau ikut sistem UMi ini, bagaimana itu, apakah sudah dapat, mereka sudah paham, ataupun masih menolak.

Nah, kemudian yang kedua soal tadi juga banyak sudah disampaikan teman-teman saya masih, ya Pimpinan yang mulia ada yang 30 juta orang yang belum masuk dalam sistem keuangan formal. Nah, itu yang mau dijaring, yang di antaranya saya dengar tadi ada 5 juta yang masih jadi korban rentenir itu. Nah, ini meskipun negatif ya pihak BRI dan yang termasuk dalam ekosistem ini harus belajar juga, kenapa mereka, kenapa mereka terjebak di dalam laut korban.

Jadi korban rentenir ini ya, karena di sana pelayanannya cepat ya, tanpa jaminan, ya misalnya pinjam uang dua juta, tapi bunganya 100% bisa empat juta, tapi bisa juga mereka mengembalikannya, kenapa, karena ditagih terus, didekati terus segala macam, kalau dimasuk ranah pinada orang tidak bayar, ya para rentenir juga tak bisa menuntut. Nah ini perlu dipelajari juga yang diinginkan oleh para nasabah yang belum masuk di dalam sistem ini terutama korban rentenir ini, menginginkan ya pinjaman itu tidak, tidak banyak-banyak syarat ya, tidak menyulitkanlah. Selama ini keluhan kami di dapil ini mereka-mereka yang kami latih UKM segala macam sulitnya masuk di dalam sistem formal perbankan ya Pak, syaratnya terlalu berat tapi kita maklumi juga kan, perbankan kan takut NPL itu.

Jadi ini harus dipelajari ya, dipelajari benar ya mungkin jadi anu juga pelajaran walaupun negatif, tapi kita membuatnya negatifnya dari positif yaitu pelayanan cepat tidak berbelit-belit sehingga mereka masuk terjaring di dalam sistem keuangan formal 30 jutaan orang itu. Saya kira itu saja Pak Ketua.

Kemudian yang terakhir Pak Ketua, mohon dipahami saya belum bisa hadir sampai tanggal 27 karena mau mengawinkan anak, jadi tanggung kembali. Nah, saya sekaligus mengundang teman-teman termasuk Pak Menteri, Pak Wamen dan lain-lain, kalau tak bisa enggak apa-apa, buat kiri ajalah oleh papan bunga gitu itu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Tanggal 20 Pak ya?

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Tanggal 27 Pak.

KETUA RAPAT:

27. Kita bikin spesifik kunjungan ke sana Pak.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Tak ada lagi spesifik.

KETUA RAPAT:

Setuju enggak Pak. FGD di sana, di tempat acara.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Jadi gitu ya.

KETUA RAPAT:

VVIP manten.

Nah segera kita mau skors dulu. Tapi sebelum kita skors karena ada beberapa mau kita konsultasikan dengan pemerintah terakhir untuk Pak Nasril Bahar.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya, terima kasih Pimpinan

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Pak Menteri dan segenap jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang kami hormati.

Saya mencermati persoalan holdingisasi PNM bersama Pegadaian akan menjadi sebuah holding di RI. Dari paparan demi paparan baik dalam diskusi-diskusi terdahulu dan berakhir pada hari ini mudah-mudahan akan berjalan baik dan mulus yaitu dengan Raker bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara. Pada hemat kami bahwa dari seluruh paparan ini mempunyai itikad baik untuk kepentingan bangsa negara, keberpihakan kepada rakyat terlihat pada sistem ekosistem yang dibangun seperti ini.

Tentunya sebaik apapun sebuah program, sebaiknya apapun tujuan, kita selaku negara yang berpegang kepada sebuah regulasi yaitu undang-undang dan peraturan yang berlaku, catatan-catatan tersebut telah kami sampaikan pada diskusi-diskusi terdahulu kepada Pak Tiko yaitu beberapa hal merupakan catatan bagi kami.

Catatan pertama saya, ini adalah sebuah peristiwa korporasi ya yang kalau kita melihat kebijakan korporasi pada tahun 2014 yaitu dengan terbitnya PP/72, PP/72 yaitu tentang holdingisasi sekaligus swab saham Inbreng kepada PTPN 3 di mana masing-masing seluruh PTPN memiliki 10% saham. Artinya apa itu terkonsolidasi dilepas saham masing-masing PTPN ke PTPN 3. Ini peristiwa yang pertama yang, yang kami baca, yang kami alami pada periodisasi yang lalu. Nah, ini selimuti dengan, diawali dengan PP 33 tahun 2005 tentang Privatisasi. apakah PP 33 tahun 2005 ini telah terimplementasi dalam sebuah sistem holdingisasi yang ya yang akhirnya dibungkus dengan PP/72. PP 72 Tahun 2016 yaitu Penyertaan Modal Negara Tanpa Melalui Sistem APBN, yaitu mekanisme yang ada di DPR.

Nah, ini yang sesungguhnya menjadi *dispute* bagi kita kah Pak Menteri. Tolong kami dicukupkan ya kekuatan hukum sistem yang berlaku dengan memakai PP/72 Tahun 2016 ini, karena hasil dari Mahkamah Konstitusi tahun 2018 yaitu PUU Nomor 14 ya, ini akan menjadi sebuah perdebatan, perdebatan regulasi apakah DPR bisa menerima secara utuh PP 72 itu dulu peran kita sebagai Anggota Komisi VI ya, apakah DPR bisa menerima PP 72 tanggal 2016 ini. Ini, ini catatan kita bersama Pak Aria Bima ya.

Yang kedua, saya juga mengingat salah satu ya, salah satu pasal PP 72 Tahun 2000 tahun 2014 yaitu tentang Holdingisasi PTPN, di mana disebutkan PTPN I sampai PTPN XIV ya, tidak lagi tunduk kepada Undang-Undang Tahun 2019, hanya tunduk Undang-Undang 70 Tahun 2000, 2007 yaitu tentang Perseroan. Artinya apa ya? Akankah PNM, PNM dan Pegadaian ini tidak lagi tunduk kepada Undang-Undang 19 Tahun 2003. Nah, ini artinya mereka bukan lagi BUMN tetapi adalah swasta. Nah, ini yang menjadi *basic* hukum bagi saya semenjak digulirkannya PP 72/2014 yaitu tentang Holdingisasi PTPN III sampai kita memperdebatkan hasil Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2018.

Ini catatan-catatan bagi saya, secara prinsip ya ekosistem yang dibangun dengan PNM, Pegadaian dan BRI ini cukup baik ya. Saya memberikan *support* dan memberikan jempol kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara tetapi fungsi DPR salah satu adalah *budgeting*. Nah, fungsi *budgeting* di sini ya mendegradasi kekuatan DPR di mana penyertaan modal negara, saham pemerintah tidak lagi melalui mekanisme APBN tetapi dengan mekanisme PP 72/2016. Nah, kalau ini *clear* berarti tidak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali dan tidak perlu minta persetujuan daripada DPR, cukup kita mengakui PP 72 itu 2016 itu berlaku. Itu catatan kami apa Aria Bima sebagai Ketua Komisi yang sohib saya dari tahun 2004 sampai sekarang dan saya hanya mengingatkan persoalan-persoalan regulasi tapi persoalan apa yang disampaikan oleh kementerian maupun di diskusi-diskusi terdahulu saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kawan-kawan yang telah menyampaikan tentang pendalaman-pendalaman apa yang telah dipaparkan oleh Pak Menteri dan jajaran-jajarannya terkait dengan pembentukan yang kita perlu ketegasan Menteri apakah ini hanya menyangkut masalah ekosistem ultra mikro atau penyebutan *Holding Ultra Mikro* . Ini nanti perlu hal yang perlu dijelaskan oleh Pak Menteri dan memakai *right issue* , dengan *right issue* BRI ya, yang mana ini kita butuh persetujuan, antara ada dua *holding* -nya kita tentunya mendukung. Nah *right issue* -nya kita pada posisi karena di dalam undang-undang, saya sudah cek bahwa ini hanya perlu konsultasi jadi kita bisa memahami hal yang terkait dengan *right issue* nanti perlu penjelasan dulu.

Kemudian, tadi juga terkait beberapa hal kawan-kawan masih menginginkan kepastian adanya jangkauan layanan kepada seluruh pelaku sektor ultra mikro itu di seluruh wilayah Indonesia. Apakah dengan adanya pembentukan *Holding Ultra Mikro* ini akan ada peningkatan lapangan pekerjaan bagi seluruh karyawan yang ada atau bahkan justru menambah, juga hal yang terkait dengan target-target spesifik yang terukur tadi banyak teman-teman menyampaikan.

Mau direspon dulu Pak Menteri atau kita ketemu dulu untuk bicara dua hal, karena saya berharap setelah Pak Menteri merespon, draf kesimpulan sudah bisa kita paparkan.

Skors dulu ya, terima kasih mohon persetujuan bisa kita skors dulu ya. Setuju ya.

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

(RAPAT DISKORS)

Skors segera kita cabut. Pak Menteri akan memberikan beberapa respon terkait hal-hal yang penting dari pertanyaan ataupun pendalaman dari kawan-kawan Anggota Komisi yang selanjutnya kita akan ambil satu keputusan rapat. Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan respon beberapa pendalaman dari kawan-kawan Anggota Komisi VI terkait hal yang sudah disampaikan dari paparan dari Kementerian BUMN untuk materi pada siang hari ini. Kami persilakan.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya akan coba jawab poin-poin besarnya.

Terima kasih atas pertanyaan, saran, masukan, kritik daripada Anggota Dewan hari ini. Ada Pak Herman, tadi ada Bu Evita, Pak Darmadi, lalu Pak Edi Baskoro, Pak Khilmi, Pak Mukhtarudin, Pak Ade Rosiade, lalu juga ada

Pak Musaspel, Pak La Tinro, Pak Sonny, Pak Supratman, Pak Amin, Pak Nyat Kadir, Pak Nasril dan Pak Nashim Khan juga dan juga Pak Nusron Wahid.

Adapun mungkin yang saya bisa sampaikan poin-poin besarnya. Nomor 1 bahwa tentu pembentukan daripada *holding* daripada ultra mikro, itu juga bagian menjawab ekosistem yang harus kita perbaiki secara bersama. Saya melihat bahwa dan tentu para Anggota Wakil Rakyat yang terhormat juga menyepakati, salah satu industri yang sangat terbuka sekarang dalam mekanisme pasar yaitu di industri keuangan atau perbankan, di mana di situ kita bisa lihat bahwa ada kepemilikan asing yaitu bank asing, ada juga bank yang dimiliki swasta. Tetapi *alhamdulillah* banyak juga Bank-bank Himbara yang sangat kuat dalam berkompetisi secara pasar bebas, karena itu juga kami selalu memperbaiki daripada kinerja masing-masing perbankan dengan memperkuat daripada turunan jenis usahanya.

Tentu Covid-19 juga meminta kita menjadi perubahan yang cukup signifikan di industri perbankan. Salah satunya kemarin dengan konsep digitalisasi daripada industri keuangan yang memang kita terus harusantisipasi. Kemarin lahir bank digital di Indonesia yang memang suka tidak suka menjadi kompetisi baru dan kalau kita lihat dari digital ekonomi ini kembali sangat terbuka. Apalagi peraturan pemerintah kita juga nilai kompetitifnya ini yang harus kita jaga. Nah, karena itu kami sejak awal tidak hanya melihat *Holding Ultra Mikro* menjadi hal yang positif juga memperkuat daripada *foot print* daripada BRI sendiri, Pegadaian, PNM, dalam melindungi ultra mikro.

Kita, juga kita kemarin menggabungkan bank syariah yang di bawah Himbara tidak lain kembali sama tujuannya memperkuat, termasuk kita juga menstrategikan yang terbaru untuk BTN dan lain-lainnya. Dan tentu catatan lain yang kami juga pertegas kepada bank-bank yang ada di Bank BUMN sendiri digitalisasinya juga harus terus diperkuat.

Tentu tadi dari para Anggota DPR yang terhormat menyarankan beberapa catatan seperti bagaimana pengawasan terpadu setiap tahun, tentu itu menjadi hal masukan yang penting dan kami akan terus jaga. Lalu bagaimana juga memastikan *cost of fund*-nya turun tidak nantinya nyangkut di BUMN-nya tapi *cost of fund*-nya turun benar-benar berdampak di nasabahnya. Itu juga menjadi yang sangat penting catatan untuk kami lakukan juga.

Catatan lainnya juga jangan juga merubah pola bisnis yang ada atau *success story* dari PNM, Pegadaian yang memang hari ini menjadi hal yang positif juga untuk ultra mikro dan UMKM itu juga pasti kami jaga, dan tidak mungkin kita juga malah men-*success*-kan industrinya. Nah, bahkan justru kita berharap dengan efisiensi yang kita lakukan, justru menjadi penguatan dalam hal penjangkauan nasabah, nasabah baru dan tidak itu juga nasabahnya harus juga naik kelas.

Yang lainnya juga tadi mengenai kepegawaian. Justru kami terbalik berpikirkannya ketika jenis usahanya bagus, pengembangan cabang juga terbuka, menambah nasabah, suka tidak suka ya pegawainya akan justru akan menambah. Nah, tetapi ini yang kita justru sepakat dengan anggota DPR tadi Bu Evita menekankan seharusnya standarisasi. Nah, tentu

upgrading ini yang juga akan menjadi *challenge* buat kami dalam operasional ya supaya tadi kualitas daripada SDM-nya sendiri standarnya baik, bukan malah menurun.

Yang lainnya yang saya bisa tambahkan *high light-high light* lainnya yaitu tadi pertanyaan dari Pak Herman mengenai, mengenai direksi BUMN. Saya rasa pergantian Direksi BUMN kita sangat konsisten. Kalau kita lihat banyak juga Direksi BUMN yang tetap kita pertahankan walaupun diangkat oleh kementerian sebelumnya, tetapi juga ada direksi yang kita angkat baru. Pertanyaannya tentu ada yang menggelitik, kenapa ada beberapa direksi yang baru kemarin dibebastugaskan dan apakah ini pasti pertanyaannya karena kepentingan? Tidak. Kita *manage* semua ini tidak karena *like and dislike*.

Catatan kami untuk Pelindo sendiri, Pelindo itu sudah mempunyai *roadmap* yang harus tuntas di-*quarter* keempat, karena kita tahu sekarang biaya logistik daripada Indonesia secara *percentage* daripada PDB itu masih tinggi 23% dibandingkan beberapa negara lain seperti: Cina yang 15%, Malaysia tetangga sendiri 13%, India 13%, South Korea 9%, Jepang 9%, EU 9%, Amerika 8%, jadi rata-ratanya 12%, kita di 23%, jadi ada 11% yang tidak efisien. Nah, karena itu memang kenapa Pelindo 1, 2, 3, 4 yang kemarin sudah dirataskan dan juga kita tersosialisasikan pasti nanti ke sini juga ya, berbeda dengan yang BRI dan Pegadaian, PNM, yang *existing* bisnisnya dipertahankan.

Tetapi kalau Pelindo ini merger total dan surat persetujuan dari Pak Menhub sendiri sudah keluar, di mana memang nanti penggabungan ini justru memperkuat daripada fokus bisnis daripada Pelindo sendiri untuk kompetitif di era global, empat jenis usahanya. Jadi walaupun 4 ini jadi satu, jenis usahanya tetap 4, tetapi benar-benar terfokuskan di 4 hal: satu peti kemas, satu non peti kemas, satu logistik, satu *equipment*. Dan ini justru menjadi kekuatan tersendiri buat kita di era tadi pandemi, paska pandemi, di mana *base to base* yang namanya *supply chains* itu sekarang *direct point* dari satu negara langsung ke negara lain. Seperti kemarin bagaimana industri cargo langsung kita terbangkan dari Manado langsung ke Jepang tidak lewat Singapura lagi ataupun kemarin yang dari Padang langsung ke Cina tidak lewat Singapura lagi.

Sama nanti di industri daripada *seaport* ataupun pelabuhan ini sama kita akan coba *direct*, karena kita memotong. Tetapi kunci daripada dari *direct* juga penting ketika apa, kekuatan *bargaining power* kita kuat.

Nah, Alhamdulillah dengan justru nanti penggabungan Pelindo ini, nanti untuk peti kemas kita itu naik kelas, yang tadinya ranking 12 dunia menjadi ranking 8 dunia yang di mana jumlah *teus*-nya yang tadinya 7,64 juta, sekarang nanti jadi 16,7 juta *teus*. Nah, ini suatu loncatan yang luar biasa dan ini menjadi *bargaining power* kita juga kenapa, kita mau langsung, langsung saja sekarang, tidak perlu ada negara perantara. Juga sama seperti juga yang sedang kita bahas juga di BUMN mengenai industri emas, yang di mana emas-emas kita harus *trading* ke Hongkong dan Singapura, nanti baliknya barang ke kita lagi dibagusin lagi, kirim lagi. Nah, ini kan *inefficient* yang kita harus lawan ke depan. Jadi jelas kenapa ada pergantian-pergantian itu

karena tadi ada KPI, ada *roadmap* yang ditarget kita merasa belum cukup cepat daripada pergantian direksi yang ada.

Sama juga ketika RNI. Saya ingat waktu itu juga Pimpinan DPR menanya mengenai RNI sama, bahwa *holding* pangan ini masih terasa lambat padahal dengan situasi Covid yang sekarang pangan menjadi ujung tombak. Apalagi kemarin di pemerintah sendiri sudah memulai membahas rapat mengenai bahan, Badan Pangan Nasional yang kembali nanti juga akan menjadi diskusi menarik di BUMN sendiri karena kita satu, punya RNI yang kita jadikan *holding* pangan, tapi kita juga punya Bulog.

Di RNI kita sudah punya *roadmap* yang jelas, di mana tadi kita klasifikasikan bahwa Sanghyang Sri Pertani akan fokus di beras, jagung, cabai dan lain-lain, dan juga Berdikari akan fokus di ayam, sapi, lalu Perindo Perinus akan di ikan, lalu garam dan nanti semua distribusinya dan semua daripada per gudangnya ada di BGR dan RNI menjadi *trading company*-nya. Nah, hal-hal ini tentu bagaimana kembali *supply chains*, produksi nasional dan import, harus berjalan baik tidak bisa kembali seperti hari ini, selalu ada perbedaan keputusan antara produksi nasional dan impor, nah ini kita coba selaraskan. Nah, karena itu, kemarin juga kenapa direksi daripada RNI kita ganti dan kita mendapatkan figur yang menurut saya baik karena bisa melihat implemen daripada perubahan signifikan bisnis model yang kita maukan seperti juga tadi yang ultra mikro.

Tentu jawaban-jawaban lainnya saya berikan ke Pak Tiko sebagian untuk detailnya dan nanti untuk hukumnya saya rasa sudah reses dan kita sudah diskusi jalan hukumnya.

Silakan Pak Wamen.

Terima kasih.

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMOJO):

Baik.

Terima kasih Pak Menteri.

Bapak, Ibu.

Kami tambahkan beberapa hal. Tadi saya rasa banyak sekali pertanyaan terkait dengan bagaimana implementasinya. Jadi kami sebenarnya di dalam materi yang detail kami sampaikan di FGD Pak, itu sudah ada target tahunan, mengenai target nasabahnya berapa, target penurunan *cost of fund* nya berapa, dan target penurunan *overhead* berapa. Nah, itu juga akan ada KPI. KPI bersifat KPI *cross* perusahaan, yang nanti akan disampaikan menjadi KPI di organisasi BRI, Pegadaian, PNM. Nah, kami untuk *holding* ini akan mendirikan *executive committee* Pak. Jadi semacam PMO yang berkelanjutan yang nantinya akan memantau seluruh implementasi dari program ini sampai pencapaian KPI dan integrasinya.

Jadi, ini kami juga menjawab juga beberapa Anggota Dewan yang menyampaikan isu mengenai kegagalan beberapa *holding* di masa lalu pada waktu awal karena memang setelah *holding* ini terjadi ini tidak bisa dilepas Pak harus ada yang *executive committee* atau PMO yang menjaga bahwa

semua target dan integrasi yang dijalankan itu benar-benar sesuai dan setiap tahun di *di-review* dan harus *on track*. Ini yang nanti kami akan laporkan juga ke Anggota Dewan dalam kesempatan-kesempatan di tahun-tahun berikutnya untuk memastikan bahwa yang kita putuskan hari ini benar-benar implikasinya kepada nasabah dari kaca mata *cost of fund* implikasi dari akuisisi nasabah baru maupun integrasi jaringan akan kita laporkan secara berkala sehingga Anggota Dewan bisa melihat KPI-nya tercapai atau tidak dari proses integrasi ini.

Kami juga menyoroti tadi beberapa poin bahwa dari kaca mata *co-location* ini memang kami belum agresif karena memang belum ada persetujuan. Nanti, begitu persetujuannya ada, *co-location* ini akan kami buka lebih lebar dan bukan dalam konteks di dalam pada ini, tetapi akan di luar. Jadi, memang kalau nanti cabangnya itu mungkin di depannya pun ada tulisannya ini BRI, Pegadaian, PNM.

Kalau sekarang ini memang hanya satu kursi di dalam sehingga memang belum efektif. Nah, ini tentunya begitu resmi kita akan lakukan *co-location* yang lebih agresif dan lebih terbuka lagi. Kami menyakini sekali, memang segmen dari tiga ini sebenarnya tidak *overlap*, karena beda di sisi *size* dan tadi di sisi konsepnya, ada yang dipakai jaminan, ada yang fidusia, ada yang menggunakan kredit usaha rakyat. Nah, tinggal bagaimana nanti kita memastikan bahwa seluruh *account manager*, AO, maupun para mantri di BRI ini benar-benar bisa memasarkan dan memastikan bahwa para calon nasabah UMKM ini paham apabila mereka butuhnya pendampingan maka mereka ke PNM. Apabila mereka punya barang jaminan mereka akan ke Pegadaian, dan apabila mereka sudah cukup besar dan membutuhkan KUR itu ke BRI. Ini memang nanti sosialisasi ini jadi PR bagaimana nanti ini benar-benar bisa menimbulkan pemahaman yang baik di masyarakat.

Tentunya tadi *concern* bahwa para pegawai kami akan terus sosialisasi. Kami meyakini bahwa integrasi ini nanti akan menghasilkan peningkatan pendapatan dan laba di Pegadaian dan PNM, yang kami meyakini akan bisa di *pass on* baik ke nasabah maupun kepada karyawannya. Jadi, itu tadi memang isunya bagaimana setelah konsultasi ini bisa disetujui, kami akan terus melakukan sosialisasi dan memastikan seluruh lapisan pegawai di Pegadaian, PNM memahami.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sedikit Pimpinan bagaimana *me-leverage* yang Pegadaian karena 90% *outstanding loan*-nya kan itu rumah tangga, non-pengusaha mikro, bukan pengusaha mikro. Nah ini kan butuh strategi khusus Pak.

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMOJO):

Iya Pak.

Jadi memang Pegadaian ini kan sebenarnya kan indahnya itu karena kecepatan itu kan Pak, bahwa mereka begitu punya barang mereka cair cepat sekali gitu. Nah, ini memang kebutuhannya bisa beda Pak kalau misalnya

mereka memang usahanya sifatnya memang *trading*, dia pasti akan menggunakan dengan konteks modal kerja harian atau mingguan Pak. Tapi begitu mereka nanti misalnya naik kelas mempunyai usaha yang lebih permanen Pak, misalnya mulai bikin pabrik, atau mereka membuka toko. Nah, mereka membutuhkan kredit yang lebih permanen, tenornya lebih panjang Pak. Nah, ini yang nanti memang kami harus terus mensosialisasikan bahwa memang ini nanti kalau misalnya mereka sekarang masih *trading* dengan jaminan emas atau jaminan apa pun harian.

Kalau nanti saatnya mereka akan membutuhkan kredit yang lebih permanen, mereka bisa mengakses ke KUR-nya Pak. Memang sekarang ini ibaratnya kalau orang mau cari kredit harian atau mingguan dan mereka mau cara KUR itu seolah ke dua tempat yang berbeda, dan masyarakat juga mungkin belum paham bahwa yang di mana yang bisa mendapatkan apa. Ini memang PR kami Pak untuk menjelaskan pada para calon nasabah maupun nasabah bagaimanakah mereka melihat produk-produk ini dalam dalam rangka mereka menyesuaikan dengan kenaikan kelas usahanya Pak.

Ini yang nanti kita harus tekankan, sebenarnya sekarang di PNM sebagai contoh sudah banyak ibu-ibu yang sudah tiga, empat, siklus Pak, mengikuti program Mekaar, tapi mereka sekarang belum tahu kalau mereka mau naik kelas katakanlah jadi 20 juta kreditnya atau jadi 15 juta. Itu caranya bagaimana, sekarang mereka ini masih di misalnya 2 juta, 5 juta, di empat siklus harusnya mereka bisa naik kelas ke 10 juta 20 juta di KUR Pak.

Nah, ini harapan kami nanti setelah ini resmi. Kita akan terus komunikasi Pak sehingga masyarakat ini paham Pak kalau mereka ini naik kelas atau merubah konsep kredit dengan jaminan dan cepat atau mau jadi permanen panjang, itu bagaimana cara mengaksesnya, enggak mudah Pak, memang nanti perlu sosialisasi.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Iya memang nanti diperhatikan ya, karena *co-location*-nya kan gagal Pak.

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMOJO):

Belum Pak.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pilot project-nya kan gagal Pak.

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMOJO):

Siap Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup?

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMOJO):

Cukup Pak.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Cukup.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Satu hal Pak Bima, sedikit aja 1 menit, 1 menit.

Jadi Pak Tiko, menurut saya jangan pula kemudian bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini semuanya dilimpahkan kepada persoalan, misalkan tadi mereka tidak bisa naik kelas karena persoalan ketidaktahuan dan lain sebagainya. Menurut saya semua tahu, semua, semua rakyat sudah tahu sekarang, KUR sudah tahu semuanya, hanya persoalannya memang bank konvensional kita kadang-kadang tidak jempot bola gitu.

Nah, mungkin bisa di-*relation*-kan di sana gitu, bahwa sesungguhnya dengan penggabungan ini juga bisa saja peran dari apa namanya Permodalan Nasional Madani bisa kemudian menjadi agen terhadap BRI, misalkan, untuk meningkatkan kelas. Jadi jangan pula kemudian menjual rakyat, tapi untuk kepentingan korporasi, tapi bagaimana urgensi korporasi untuk bisa membantu rakyat.

Itu saja menurut saya debatnya.

Terimakasih.

WAMEN BUMN II (KARTIKA WIRJOATMOJO):

Sejutu Pak, Pak Herman setuju sekali. Memang kami tadi terakhir Pak memang di level pegawai pun Pak kami pun yang mempuyai PR besar Pak, tadi saya sampaikan *cross KPI* Pak. Memang ini kita akan mulai *testing* juga, ini sebagai contoh kan sekarang kita yang menarik ini ada produk Tabung Emas di Pegadaian. Tabung Emas ini sangat ideal Pak karena nasabah itu bisa beli emas 5gram, 3gram tanpa perlu pegang fisiknya. Nah, ini kalau nanti para AO-nya PNM sudah bisa menjadi agen Pegadaian dalam menjual Tabung Emas ini, mereka bisa dapat *extra income* juga dalam bentuk *fee*. Nah, ini nanti kami akan bentuk Pak *cross selling-cross selling* ini, sehingga antar pegawai pun juga mereka saling semangat Pak, karena mereka dengan menjual produk dari saudaranya ini akan mendapatkan *extra income* juga Pak, sedang kami rancang juga Pak.

Demikian Bapak, Ibu.

Terima kasih.

Sementara itu dulu.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sedikit, sedikit aja Pak.

Jadi yang saya khawatirkan justru Pegadaian lho sebetulnya, kalau PN Madani sih saya enggak terlalu khawatir, karena ini kan 90% *outstanding*-nya tadi ibu rumah tangga. Jadi ini yang harus diperhatikan bagaimana *wong* BRI jual ke ibu-ibu rumah tangga itu kan, karena yang bagi mereka tadi yang saya sebutkan, nih saya bawa ini, saya mau cepat dapet duit gitukan dan rata-rata adalah ibu-ibu yang kepepet Pak, bukan karena bisnis, kepepet mau gadai aja, begitu Pak.

KETUA RAPAT:

Iya ini nanti dijawab saja dalam jawaban tertulis.

Dari meja pimpinan masih ada, Pak Ketua? Dari saya hanya tadi sudah disampaikan saya tetap pingin mengetahui jaminan prasyarat-prasyarat untuk keberhasilan mengenai *Holding Ultra Mikro* ini. Itu apa saja yang disiapkan nanti untuk menempuh dalam skenario satu, skenario dua, skenario tiga untuk bisa tercapainya, tujuannya sudah, tadi dasarnya sudah, target sasarannya jelas. Tapi prasyarat-prasyarat untuk mencapainya itu seperti apa dan tadi Pak Darmadi juga menyampaikan peran dari institusinya tadi sangat berbeda. Kalau Pegadaian selama ini lebih pada hal yang terkait membantu kesulitan likuiditas yang sangat-sangat jangka pendek, dan tentu sebaliknya PNM maupun BRI itu berbeda. Jadi ukuran-ukuran keberhasilan ini tentunya sangat beda. Ini kami mohon untuk ada jawaban-jawaban tertulis nanti supaya kita lebih yakin untuk memberikan satu keputusan-keputusan yang hari ini akan kita buat.

Kami persilakan Sekretariat menampilkan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan Anggota Komisi VI di dalam pendalaman setelah paparan dari kementerian, yang pertama dari Pak Herman Khaeron ada kurang lebih 6 pertanyaan, kemudian Ibu Evita Nursanty ada 9 pertanyaan, kemudian dari Pak Ibas, Pak Edi Baskoro, uraian ada lima pertanyaan, kemudian Pak Khilmi ada 3 pertanyaan, Pak Mukhtarudin ada 4 pertanyaan, Pak Darmadi Durianto ada 4, Pak Andre Rosiade ada 4, kemudian Pak Nasim Khan ada 2, Pak Nusron Wahid ada 2, Pak Rafsel ada satu, Pak La Tinro itu ada 3, Pak Supratman ada 3, Pak Amin ada 3. Saya kira cukup dan draf kesimpulan rapat Komisi VI

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Pertanyaan saya enggak ada Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya siapa.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Sonny Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, Pak Sony belum?

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Bukan, belum dicatat tadi.

KETUA RAPAT:

Oh, Pak Sonny belum dicatat. Sudah ada Pak Sonny, tapi belum masuk, bisa ditampilkan?

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Nggih matur nuwun.

KETUA RAPAT:

Iya nanti kita tampilkan lagi setelah draf kesimpulan, ada kendala apa Pak, Pak Sonny? Terbaca tadi? Pak Sonny kita tampilkan setelah kesimpulan, biar dipersiapkan.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri BUMN tentang Pembahasan Pembentukan Holding Ultra Mikro:

1. Komisi VI DPRRI mendukung pembentukan Holding Ultra Mikro dan memahami *right issue* BRI dengan cara mengalihkan seluruh saham Seri B Negara pada PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian kepada BRI sepanjang Pemerintah masih mempunyai kontrol penuh untuk PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian melalui saham Dwiwarna.
Setuju ya? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Komisi, draf kesimpulan kedua:

2. Komisi VI DPRRI bersama Pemerintah akan memastikan penguatan kontrol Pemerintah terhadap anak perusahaan BUMN melalui Saham Dwiwarna dalam revisi Undang Undang BUMN.
Ini merupakan akibat juga dari keputusan kesimpulan pertama, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian ada beberapa catatan dari teman-teman yang kita jadikan kesimpulan dalam rapat hari ini untuk disampaikan kepada Pak Menteri beserta jajarannya.

3. Komisi VI DPRRI meminta Kementerian BUMN untuk

- a) Memastikan pembentukan holding BUMN ultra mikro dapat meningkatkan jangkauan layanan kepada seluruh pelaku sektor ultra mikro di seluruh wilayah Indonesia serta berkontribusi pada peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat prasejahtera di Indonesia.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

- b) Komisi VI DPRRI meminta kepada Kementerian BUMN untuk membuat target kinerja yang spesifik dan terukur atas pembentukan holding BUMN ultra mikro sehingga efektivitas holding BUMN ultra mikro dapat dievaluasi dengan baik kedepannya.

(RAPAT: SETUJU)

Komisi VI DPRRI meminta Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap holding BUMN ultra mikro sehingga pembentukan Holding Ultra Mikro benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di sektor ultra mikro.

(RAPAT: SETUJU)

Komisi VI DPRRI meminta Kementerian BUMN untuk pembentukan Holding Ultra Mikro dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional di masing-masing BUMN yang terlibat, yaitu: PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Madani. Komisi VI DPRRI meminta kepada Menteri BUMN untuk hal yang terkait holding BUMN ultra mikro, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terkait dengan integrasi dan pembentukan holding BUMN ultra mikro.

4. Komisi VI DPRRI meminta Kementerian BUMN dan BUMN terkait untuk menyampaikan jawaban tertulis atas Anggota Komisi VI DPRRI secara tertulis paling lama 10 hari kerjanya, kinerja, 10 hari kerja, kerja.

Tolong tampilkan yang Pak Sonny masih ada? Hilang, oh di rekaman. Ya Pak Sonny sudah saya cek di rekaman masih baru akan ditulis.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pertanyaan saya Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Nasril ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ada satu pertanyaan saya tuh ya, sebab mungkin harus dijawab Pak Menteri, apakah dengan holding ini Peraturan Pemerintahnya akan dijadikan *copy paste* dengan sama seperti seperti holding PTPN III, karena yang di

holding tersebut tidak lagi tunduk kepada Undang-Undang 19, tapi sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Persero. Saya berharap iya kan, meskipun sudah di-holding-kan PNM dan Pegadaian itu tunduk juga tunduk kepada Undang-Undang 19. Jadi tidak merupakan *copy paste* dengan holding yang sebelumnya, itu yang yang kami lihat di pada PP 72 Tahun 2014, yaitu pada pada holdingisasi PTPN III, itu kami kalau demikian berarti PNM dan Pegadaian tidak lagi BUMN. Catatan kami itu Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Nasril, lobby tadi justru yang paling besar dibahas adalah pernyataan Pak Nasir terkait dengan posisi BUMN yang menjadi anak perusahaan, maka untuk hal yang terkait dengan *right issue* dan Holding Ultra Mikro kali ini di dalam kesimpulan pertama kita tetap memberikan catatan.

F-PG (NUSRON WAHID):

Bagian yang tidak terpisahkan.

KETUA RAPAT:

Bagian yang tak terpisahkan dari keinginan kita pada saat nanti merevisi Undang-Undang BUMN, di mana peran daripada pemerintah untuk tetap bisa mengontrol penuh hal yang terkait dengan saham pemerintah yang masih ada di anak perusahaan. ini yang kami berikan catatan bahwa di dalam kesimpulan pertama tadi, saya belum punya ya *printer*-nya yang terakhir, yang terakhir saya belum punya ya. Jadi, dalam kesimpulan tadi kita berikan catatan sepanjang kontrol penuh pemerintah di dalam PNM dan Pegadaian melalui Saham Merah Putih. Kemudian kita tegaskan kembali di dalam kesimpulan kedua, Komisi VI DPRRI akan memastikan penguatan kontrol pemerintah terhadap anak perusahaan, terhadap Saham Merah Putih dalam merevisi Undang-Undang BUMN. Saya kira itu yang yang tadi merupakan tak terpisahkan dari pendalaman terakhir dari Pak Nasir, saya kira itu.

Pak Nusron ada yang mau disampaikan?

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Bimo ya, begini Pak Bimo, untuk menambah penjelasan kekhawatirannya Pak Nasril Bahar senior di DPR Komisi VI dari tahun 2004, arti *concern* seperti itu, sama dengan *concern* kita semua, status anak perusahaan BUMN sepanjang kepemilikan sahamnya BUMN itu mayoritas, itu entitasnya perlakuannya dalam konteks perlakuan hukum itu masih sama dengan BUMN, hanya mungkin yang membedakan adalah SOP. Nah, yang beda dengan kalau anak perusahaannya itu sahamnya perusahaan BUMN hanya minoritas, itu mungkin tidak menjadi entitas BUMN lagi, perlakuannya beda.

Jadi, apalagi kemudian ditambah ini sahamnya BRI 99,9% di dalam PNM, kemudian sahamnya BRI di Pegadaian 99,9%, pasti dalam konteks ini

Pak Nasril tidak perlu khawatir. Saya kira itu perlakuannya masih tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang 19, dalam posisi dia bukan sebagai BUMN, tapi sebagai anak perusahaan BUMN, tapi anak perusahaan BUMN pun kan diatur di dalam Undang-Undang 19, bukan kemudian enggak diatur, hanya kemungkinannya pengaturannya berbeda dengan pengaturan BUMN induk gitu.

Saya kira itu Pak Bimo.

KETUA RAPAT:

Saya kira cukup, Senior Pak Nasril cukup ya untuk penjelasan sementara nanti kita akan bahas dalam pembahasan usulan draf RUU BUMN perubahan.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Bimo sedikit, Pak Bimo, sedikit.

Saya kira ini harus diterangkan oleh pemerintah gitu ya, karena kan komitmennya nanti ada di pemerintah biar Pak Nasril dan secara verbal ini terekam di sini, penjelasannya di pemerintah.

Saya menambahkan sedikit Pak Erick, jika kemudian bahwa *taroklah* sudah menjadi sebagian saham publik di BRI dan seluruh konsolidasi terhadap berbagai persoalan anak perusahaan, apakah juga nanti masih bisa dikontrol oleh Dwiwarna ini? Karena saya minta jawaban pemerintah bukan jawaban di belakangnya ya, karena ini penting komitmen bersama gitu.

Saya kira saya melemparkan pertanyaan itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Menteri.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Ya, terima kasih Pak Herman.

Seperti yang kita sepakati di dalam, kan memang kalau kita bicara Dwiwarna itu tidak hanya tempelan saja, tapi harus ada komitmen bagaimana tadi yang kita sepakati juga sejak awal, bahwa dalam membangun ekosistem atau holdingisasi ini tidak merubah bisnis model daripada PNM dan juga Pegadaian, justru bagaimana PNM dan Pegadaian ini kita harus perkuat. Dan kalau kita lihat juga tadi kan ada kata-kata menarik yang sempat ditanyakan bagaimana misalnya dulu yang Pertamina monopoli tidak jadi monopoli.

Jawaban saya tadi konsisten seperti yang saya sampaikan justru ini memperkuat daripada keberpihakan kita, pemerintah, kepada ultra mikro yang selama ini kadang-kadang hanya jadi wacana, dan yang penting juga

sebenarnya bagaimana ini juga diterapkan dengan institusi lain-lain. Nah, ini yang kita harapkan supaya keberpihakannya bisa jelas itu, jadi kita komit untuk menjaga itu, amanah itu kita jaga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Demikian hal yang terkait dengan penjelasan Pak Nasril tentang kekhawatiran bahwa terkait dengan Holding Ultra Mikro ini kita masih memberikan penguatan bagaimana peran kontrol untuk PNM maupun untuk Pegadaian melalui Saham Dwiwarna, ini sudah kita cantumkan dalam kesimpulan.

Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh jajaran kementerian maupun kawan-kawan sekalian yang telah mengikuti rapat sampai selesai. Apakah masih ada *closing statement* dari Pak Menteri? Saya kira cukup.

Dengan demikian rapat bisa kami tutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.17 WIB)

Jakarta, 18 Maret 2021
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP.197104071992032001